

**KONSEP DISTRIBUSI PENDAPATAN NEGARA MENURUT
MUHAMMAD BAQR AS SADR DAN RELEVANSINYA DENGAN
DISTRIBUSI APBN DI INDONESIA**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Islam
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

MUNZIR

NIM: 90100115147

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Munzir
NIM : 90100115147
Tempat/Tgl. Lahir : Bulukumba, 28 Mei 1997
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Anrihua, Desa Passimbungan, Kecamatan Kindang
Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan
Judul : Konsep Distribusi Pendapatan Negara Menurut
Muhammad Baqr Ash-shadr dan Relevansinya dengan
Distribusi APBN di Indonesia.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALA UDDIN
M A K A S S A R

Makassar, 31 Januari 2020

Penyusun,



MUNZIR

NIM: 90100115147

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Konsep Distribusi Pendapatan Negara Menurut Muhammaad Baqr Ash-Shadr dan Relevansinya dengan Distribusi APBN di Indonesia”** yang disusun oleh **Munzir, NIM: 90100115147**, mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 21 Januari 2020, bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1441 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam.

Samata, 21 Januari 2020

26 Jumadil Awal 1441 H

DEWAN PENGUJI :

Ketua : Prof. Dr. H. Abustanillyas, M.Ag.
Sekretaris : Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak.
Munaqisy I : Memen Suwandi, SE., M.Si.
Munaqisy II : Akramunas, SE., M.Si.
Pembimbing I : Dr. Hasbiullah, SE., M. Si.
Pembimbing II : Dr. Hj. Rahmawati Muin, S.Ag., M.Ag.

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Abustanillyas, M.Ag
NIP. 19661130 199303 1 003

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Yang Maha Kuasa. Hanya atas berkatnya Rahmat-nya penulis dapat menyusun skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan manifestasi Rahmat Allah ke seluruh alam, ialah manusia yang menuhan tetapi bukan tuhan manusia. Skripsi ini berjudul “Konsep Distribusi Pendapatan Negara Menurut Muhammad Baqir Ash-shadr dan Relevasinya dengan Distribusi APBN di Indonesia”. Penyusunan skripsi ini terselesaikan berkat adanya bimbingan, bantuan, serta dorongan dari berbagai pihak. Maka tak lupa dengan penuh hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, terkhusus kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Ahmad Effendi, SE. MM. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar.
4. Bapak Akramunnas, SE., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar.

5. Bapak Dr. Hasbiullah, SE., M.Si. dan ibu Dr. Hj. Rahmawati Muin, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan masukan sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
6. Bapak Memen Suwandi, SE., M.Si. dan Akramunas, SE., M.Si. selaku Penguji I dan Penguji II yang telah meluangkan segenap waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sampai skripsi ini selesai dengan baik.
7. Bapak Dr. Urbanus Uma Leu, M.Ag. (Alm) selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan masukan dalam penyusunan proposal penelitian skripsi ini sebelum beliau wafat. Semoga beliau senantiasa ditempatkan bersama orang-orang yang beriman dan amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan, memberikan ilmu pengetahuan, selama penulis melakukan studi.
9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang telah membantu kelancaran proses administrasi.
10. Bapak Tasman dan ibu Aisyah selaku orang tua tercinta yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik saya dengan penuh rasa kasih sayang. Semoga dengan gelar sarjana ini menjadi awal saya untuk dapat membahagiakan ayah dan ibu di dunia dan akhirat.
11. Bapak Nurung dan Masyita selaku paman dan bibi saya yang telah memberikan dukungan moril serta bantuan material selama saya kuliah. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada paman dan bibi.

12. Kak Andi Muhammad Basir Saransi, Alan Hidayat, Armin Rusli Makatita, Abdurrahman Mansyur, Ainul Fatha Isman, Akbar dan Andi Suwandi Putra yang selalu memberi motivasi dan menjadi kawan berdiskusi yang senantiasa menambah ilmu saya selama kuliah.
13. KSEI FORKEIS UIN Alauddin Makassar terkhusus kepada Departemen Pengembangan Sumber Daya Insani yang telah menjadi wadah saya berproses untuk belajar menjadi manusia yang profesional, bertanggungjawab, kerja dalam tim, bermusyawarah dengan baik, dan memberikan saya pengalaman yang sangat luar biasa dalam sebuah Organisasi.
14. Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam (HMJ-EI) UIN Alauddin Makassar periode 2018 yang juga telah menjadi wadah saya berproses untuk belajar menjadi manusia yang profesional, bertanggungjawab, kerja dalam tim, bermusyawarah dengan baik, dan memberikan saya pengalaman yang sangat luar biasa dalam sebuah Organisasi.
15. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINAM, Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Ekonomi dan Bisnis Islam, Angkatan 2015 Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar, yang menjadi bagian saya dalam berproses menjadi manusia yang lebih baik.
16. Ekonomi Islam 2015 kelas D (EKIS 015 D), sebagai entitas keluarga tanpa ikatan darah yang banyak memberikan saya pelajaran dan pengalaman selama kuliah di kampus peradaban. Semoga kita dapat berkumpul lagi di lain waktu.
17. Seluruh sahabat terbaik penulis dalam hal ini Manjalin, Ahmad Halim, Ali Wardani, Ilham Bahar, Ruslam, Munzir, Ishlahuddin, Nurul Hudaya, Amalia Undip Putri M dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan

namanya. Semoga kita semuanya sukses di dunia dan akhirat serta menjadi manusia-manusia berguna bagi bangsa dan negara.

18. Semua keluarga penulis, teman-teman, dan berbagai pihak yang namanya tidak dapat dituliskan satu per satu terima kasih telah membantu penulis dengan ikhlas dalam banyak hal yang berhubungan dengan penyelesaian studi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukan merupakan yang terbaik. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat dibutuhkan untuk perbaikan skripsi ini selanjutnya. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pembaca. Akhir kata

Alaikumarahmah wassa'adah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Makassar, 31 Desember 2019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R Munzir

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Fokus Penelitian.....	7
D. Defenisi Operasional.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metodologi Penelitian.....	12
G. Tujuan Penelitian dan kegunaan penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II BIOGRAFI MUHAMMAD BAQR ASH-SHADR.....	16
A. Riwayat Hidup.....	16
B. Karya-Karya.....	18
C. Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqr Ash-shadr.....	21
D. Kerangka Konseptual.....	45
BAB III DISTRIBUSI APBN DI INDONESIA.....	46
A. Distribusi.....	46
1. Pengertian Distribusi.....	46
2. Faktor-Faktor Distribusi.....	47
3. Distribusi dalam Islam.....	49
B. Pendapatan.....	52
1. Pengertian pendapatan.....	52
2. Sumber-sumber Pendapatan.....	52
3. Faktor-faktor mempengaruhi pendapatan.....	53
C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).....	55
1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.....	55
2. Sumber-sumber pendapatan Negara.....	56
3. Sumber-sumber Pengeluaran Negara.....	60
4. Konsep Distribusi APBN.....	61
BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD BAQR ASH-SHADR TENTANG DISTRIBUSI PENDAPATAN NEGARA DAN	

RELEVANSINYA DENGAN DISTRIBUSI APBN	
DI INDONESIA.....	68
A. Distribusi Pendapatan Negara Menurut Muhammad Baqr Ash-shadr	68
B. Relevansi Pemikiran Baqr Muhammad Baqr Ash-Shadr dengan Distribusi APBN di Indonesia	90
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN.....	104
RIWAYAT HIDUP.....	105



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Perkembangan Rasio Gini di Indonesia	4
Tabel 4.4 Belanja Pemerintah Pusat Menurut fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018-2019	100



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	45



ABSTRAK

Nama : Munzir
Nim : 90100115147
Judul Skripsi : **Konsep Distribusi Pendapatan Negara Menurut Muhammad Baqr Ash-shadr dan Relevansinya dengan Distribusi APBN di Indonesia**

Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis pemikiran Muhammad Baqr Ash-shadr tentang Konsep distribusi pendapatan Negara dan menganalisis relevansi pemikiran Muhammad Baqr Ash-shadr dengan distribusi Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan historis atau sejarah dengan Sumber data yang terdiri dari, data primer berupa tulisan langsung oleh Muhammad Baqr Ash-shadr yang diterjemahkan oleh Yudi dengan judul Buku Induk Ekonomi Islam “*Iqtishaduna*” dan data sekunder berupa literatur-literatur lain yang membahas tentang distribusi pendapatan Negara. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data orientasi dan eksplorasi. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data induktif dan deduktif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa konsep distribusi pendapatan negara Muhammad Baqr Ash-shadr mencakup keseluruhan aspek yang ikut menentukan pendapatan, baik itu distribusi pra produksi (sumber-sumber produksi) yang mencakup distribusi hak kepemilikan sumber-sumber daya produksi yang kemudian di bagi kedalam tiga institusi yaitu kepemilikan pribadi, kepemilikan publik atau bersama, dan kepemilikan negara sedangkan distribusi pasca produksi (kekayaan produktif) yaitu distribusi kekayaan produktif yang mencakup keseluruhan aspek dari hasil buah kerja kepemilikan sumber-sumber produksi sedangkan relevansinya dengan distribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia ialah relevan dalam distribusi pasca produksi (kekayaan produktif), dimana pemerintah mendistribusikan pendapatan kekayaan atau pendapatan negara melalui alokasi anggaran yang kemudian didistribusikan kepada setiap individu dalam masyarakat yang membutuhkan.

Kata Kunci: *Muhammad Baqr Ash- shadr, Distribusi Pendapatan Negara, APBN*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Distribusi merupakan salah satu aktivitas yang sangat penting dalam perekonomian khususnya dalam pembangunan sebuah negara. Konsep distribusi dalam ekonomi pada prinsipnya mempunyai tujuan untuk menciptakan kesejahteraan di dalam masyarakat, yaitu dengan mewujudkan pemenuhan kebutuhan bagi semua masyarakat dengan cara mendistribusikan pendapatan dan kekayaan negara secara adil dan merata. Sebagai salah satu bidang kajian terpenting dalam teori ekonomi mikro dan makro Islam, pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka tetapi juga aspek sosial dan politik sehingga menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini.¹

Salah satu pemikir ekonomi Islam kontemporer yang *concern* dengan distribusi pendapatan adalah Muhammad Baqir Ash-shadr. Dalam pemikirannya Baqir Ash-Shadr menyatakan bahwa dalam Islam harus ada koordinasi peningkatan kekayaan (pendapatan) dengan distribusi sebagai tujuan, demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan hidup para anggota masyarakat, karena Islam memandang pertumbuhan kekayaan sebagai tujuan antara, bukan sebagai tujuan akhir.² Jika pertambahan kekayaan tidak menyebabkan tersebar luasnya kesejahteraan dan kenyamanan hidup diantara para anggota masyarakat, dan membuat mereka tidak bisa mengoptimalkan potensi serta bakat-bakat alamiah mereka demi merealisasikan misi mereka sebagai khalifah di muka bumi,

¹Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002) h. 216.

²Muhammad Baqir Ash-shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, (Cet. I; Jakarta : Zahra, 2008), h. 427.

maka peningkatan kekayaan (pendapatan) tidak menjalankan peran positif di dalam kehidupan manusia.³

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang⁴ yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari minyak bumi, gas, tambang emas, batubara, nikel, dan kekayaan hutan yang membentang di seluruh kepulauan Indonesia.⁵ Akan tetapi, tidak semua masyarakat dapat menikmati kekayaan alam yang Allah swt berikan sebagai berkah, melainkan sebagai mudharat yang membuat mereka hidup dalam nestapa.

Masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan terus menjadi perhatian pemerintah, karena itu kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan keseimbangan sosial ekonomi di masyarakat melalui distribusi anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia diatur dalam kebijakan pemerintah dan disepakati atau disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat umum.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui fungsi distribusinya baik terkait dengan pemasukan maupun pengeluarannya.⁶ Berdasarkan data Kementrian Keuangan Republik Indonesia jumlah anggaran

³Muhammad Baqir Ash-shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, terj. Yudi, (Cet. I; Jakarta : Zahra, 2008), h. 427.

⁴Permata Wulandari, "Unique Aspects Of Islamic Microfinance Financing Process: Experience Of Baitul Maal Wattamwil In Indonesia", *Jurnal Humanomics*, Vol. 32, 2016, h.1.

⁵Siti Murtiyani, dkk. "Analisis dan Evaluasi Implementasi Pengelolaan Kepemilikan Umum dan Negara di Indonesia (Pendekatan Mazhab Hamfara)", *Jurnal SHARE*, Vol. 5 No. 2, 2016, h. 84.

⁶Nunung Nurlaela, "Analisis Distribusi Keuangan Negara (Studi Pemikiran Abdul Qadim Zallum)", *Jurnal Millah*, Vol. XV, No.1, 2015, h. 2.

pendapatan Indonesia maupun pengeluarannya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Data Badan Kebijakan Fiskal Kementrian RI mencatat anggaran pendapatan negara 2018 sebesar 1.894, 7 triliun dan belanja negara sebesar 2.220, 7 triliun sedangkan anggaran pendapatan negara 2019 sebesar 2.165, 1 triliun dan belanja negara sebesar 2.461, 1 triliun.

Berdasarkan data Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan Republik Indonesia yang telah diuraikan sebelumnya anggaran pendapatan negara dan belanja negara setiap tahun mengalami peningkatan namun tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena melihat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masih menjadi persoalan utama yang sampai saat ini masih dihadapi masyarakat Indonesia.

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa penduduk miskin Indonesia pada bulan Maret 2019 sebesar 25,14 juta penduduk. Dari jumlah tersebut persentase penduduk miskin di desa mencapai 12,85 persen sementara kota sebesar 6,8 persen⁷, dan tingkat ketimpangan Indonesia atau *Gini Ratio* masih di level 0,382 per Maret 2019 atau hanya turun 0,002 dari posisi september 2018 di level 0,384. Adapun dari tiga puluh empat provinsi di Indonesia, terdapat delapan provinsi yang memiliki angka ketimpangan di atas rasio gini nasional, yakni provinsi DI Yogyakarta (0,423), Gorontalo (0,407), Jawa Barat (0,402), Sulawesi Tenggara (0,399), DKI Jakarta (0,394), Papua (0,394), Sulawesi Selatan (0,389), dan Papua Barat (0,386). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang telah diuraikan sebelumnya, tingkat kemiskinan di daerah pedesaan masih relatif tinggi dibandingkan di daerah perkotaan dan diikuti dengan tingkat ketimpangan yang terdapat di beberapa wilayah atau provinsi di Indonesia masih relatif signifikan.

⁷Badan Pusat Statistik, “Kemiskinan Penduduk Indonesia,” Official Website Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/subject/4/kemiskinanpendudukindonesia.html#subjekViewTab3> (diakses pada 15 juli 2019)

Lebih jauh, potret kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia tergambar melalui tingkat penguasaan kekayaan dalam masyarakat Indonesia. Berdasarkan laporan *Credit Suisse* yang bertajuk *Global Wealth 2018* menunjukkan bahwa 10 orang tajir di Indonesia menguasai 75,3% total kekayaan penduduk, sementara 1% orang terkaya Indonesia mendominasi 46% total kekayaan penduduk.⁸ Hal ini menunjukkan masih terjadi ketimpangan yang sangat lebar antara orang kaya dan orang miskin. Berkaitan dengan data sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa masalah ekonomi yang sampai saat ini terjadi di Indonesia diakibatkan karena, kekayaan negara hanya dinikmati oleh segelintir orang saja, sehingga menciptakan adanya kesenjangan sosial diantara masyarakat dimana orang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Hal ini sejalan dengan pemikiran Baqr Ash Shadr:

“bahwa pada dasarnya masalah ekonomi muncul, disebabkan karena adanya distribusi pendapatan yang tidak merata dan tidak adil diantara masyarakat, sehingga menimbulkan terjadinya eksploitasi atas sekelompok pihak kuat, dimana pihak kuat akan mampu menguasai sumber daya yang ada sementara pihak lemah sama sekali tidak mempunyai akses terhadap sumber daya tersebut”.⁹

Muhammad Baqr Ash-Shadr menyimpulkan bahwa pada dasarnya “Tuhan telah mencukupkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia secara memuaskan (*statisfaction*), manusia sendirilah yang menyebabkan timbulnya problem ekonomi”.¹⁰ Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Qamar/54:49.

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

⁸<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/10/30/1-orang-terkaya-indonesia-menguasai-46-kekayaan-penduduk> (akses 27 juli 2019).

⁹Muhammad Baqir Ash-shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, (Cet. I; Jakarta: Zahra, 2008). h. 430.

¹⁰Siska Lis Sulistani, “Distribusi dalam Ekonomi Islam untuk Pembangunan Negara Menurut Baqir Ash-Shadr dan M Abdul Mannan”, *Jurnal Amwaluna*, Vol 1 No.1, 2017, h.139.

Terjemahan:

“Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.” (Q.S. Al-Qamar/54:49).¹¹

Muhammad Quraishy Shihab menafsirkan bahwa kata *qadar* pada ayat diatas, dari segi bahasa kata tersebut dapat berarti *Kadar tertentu* yang tidak bertambah atau berkurang, atau berarti *kuasa*. Tetapi karena ayat tersebut berbicara tentang segala sesuatu yang berada dalam kuasa Allah, maka adalah lebih tepat memahaminya dalam arti *ketentuan dan sistem yang telah ditetapkan terhadap segala sesuatu*. Tidak hanya terbatas pada salah satu aspeknya saja.¹²

Kekayaan dan pendapatan negara yang bersumber dari pajak maupun sektor publik merupakan kepemilikan negara yang harus di distribusikan kembali untuk kemaslahatan umum. Negara sebagai *wali al amr'* mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan di masyarakat, dengan melindungi segenap aset kekayaan negara dan mendistribusikan kekayaan atau pendapatan negara secara adil dan merata ke masyarakat. Sebagaimana dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran Rakyat”.¹³ Sejalan dengan Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan “Fakir, Miskin, dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”¹⁴. karena itu, pemerintah harus menjamin terciptanya keadilan dalam distribusi yang diartikan sebagai suatu sistem distribusi pendapatan dan kekayaan negara secara universal kepada masyarakat dengan memprioritaskan kesejahteraan di

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Furqon*, (Jakarta : PT Citra Mulia Agung, 2015), h. 528.

¹²M. Quraishy Shihab. “*Tafsir Al-Misbah Volume 3 Pesan, Kesan & Keserasian Al-Qur'an*”, (Ciputat: Lentera Hati, 2002), h. 482.

¹³Siska Lis Sulistani, “Distribusi dalam Ekonomi Islam untuk Pembangunan Negara Menurut Baqir Ash-Shadr dan M Abdul Mannan”, *Jurnal Amwaluna*, Vol. 1 No.1, 2017, h.144.

¹⁴Almizan, “Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam”, *Jurnal Maqdis (Kajian Ekonomi Islam)*, Vol. 1 No.1, 2016, h. 64

tengah-tengah masyarakat yang ditandai dengan menurunnya tingkat kemiskinan secara absolut, adanya kesempatan yang sama pada setiap orang dalam berusaha, dan terwujudnya aturan yang menjamin setiap orang mendapatkan haknya sebagai makhluk sosial dan warga negara.¹⁵

Hal ini dikarenakan, setiap manusia mempunyai hak yang sama dalam mengakses semua potensi alam serta segala anugerah yang Allah Swt berikan. Karena itu, prinsip keadilan yang harus diperankan oleh negara terhadap masyarakat meliputi seluruh kehidupan, mulai dari agama, pendidikan, kesehatan, hukum, politik, hingga ekonomi.¹⁶ Allah Swt berfirman dalam Q.S.Al-Hasyr /59:7.

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ...

Terjemahan:

“Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...” (Q.S Al-Hasyr/59:7).¹⁷

Menurut Quraishy Shihab, ayat tersebut bermaksud untuk menegaskan bahwa harta benda harus beredar di masyarakat, sehingga dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat dengan tetap mengakui hak kepemilikan dan melarang monopoli, karena sejak awal Islam menetapkan harta memiliki fungsi sosial.¹⁸

Islam memandang bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab atas tercapainya masyarakat yang ideal yaitu adil dan makmur dengan membela yang

¹⁵Ruslan Abdul Ghofur Noor, “Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia”, *Jurnal ISLAMICA*, Vol. 6 No.2, 2012, h. 323.

¹⁶Nurul Huda, Dkk., *Keuangan Publik Islami : Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 50.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Furqon*, (Jakarta : PT Citra Mulia Agung, 2015), h. 545.

¹⁸M. Quraishy Shihab. “*Tafsir Al-Misbah Volume 14*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 525.

lemah serta terlibat dalam masalah perekonomian.¹⁹ Karena itu, khalifah harus menciptakan keseimbangan ekonomi dengan menyuplai rakyat miskin dengan harta yang diambil dari Baitul Mal. Dengan suplai tersebut bisa diwujudkan kesejahteraan sosial masyarakat.²⁰

Berdasarkan pemikiran Muhammad Baqr Ash-Shadr diatas terkait masalah distribusi pendapatan negara, maka penulis pun merasa tertarik membahas konsep distribusi pendapatan negara Menurut Muhammad Baqr Ash-Shadr dan melihat sejauh mana relevansi pemikiran tersebut dengan distribusi pendapatan APBN di indonesia dan menuangkannya dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Konsep Distribusi Pendapatan Negara dalam sistem ekonomi Islam Menurut Pemikiran Muhammad Baqr Ash-Shadr dan Relevansinya dengan Distribusi Pendapatan APBN di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi kajian penelitian ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana Pemikiran Muhammad Baqr Ash-Shadr tentang Konsep distribusi pendapatan Negara?
2. Bagaimana Relevansi Pemikiran Muhammad Baqr Ash-Shadr dengan distribusi Pendapatan APBN di Indonesia?

C. Fokus Penelitian

Karena keterbatasan ruang dan waktu dalam penelitian maka penelitian ini membatasi lingkup penelitian hanya pada ruang pemikiran Muhammad Baqr Ash-Shadr tentang konsep distribusi pendapatan negara. Pembatasan ini menjadi

¹⁹Abdullah Zaky al-karaf, *Ekonomi dalam Persepektif Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 196.

²⁰Taqiuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), h. 271.

penting guna mengefisienkan waktu yang ada sekaligus menjaga arah penelitian agar tetap pada koridor atau tujuan penelitian yang diharapkan.

D. Pengertian Judul

Judul dalam penelitian ini adalah, **“Konsep Distribusi Pendapatan Negara dalam sistem ekonomi Islam Menurut Pemikiran Muhammad Baqr Ash-Shadr dan Relevansinya dengan Distribusi Pendapatan APBN di Indonesia”**. Dalam menghindari ketidakjelasan atau ambiguitas dalam penelitian ini maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah dan variabel dalam judul tersebut. Adapun istilah-istilah dan variabel dalam penelitian ini yaitu Analisis, Pemikiran, Muhamad Baqir Ash-Shadr, Distribusi Pendapatan, Relevansi, dan APBN.

1. Konsep adalah suatu representasi abstrak dan umum tentang sesuatu yang bertujuan menjelaskan suatu benda, gagasan, atau peristiwa.
2. Distribusi pendapatan negara merupakan proses pembagian, peredaran, penyaluran harta di dalam masyarakat baik terhadap negara kepada masyarakat, maupun antara individu kepada individu yang berhak menerimanya melalui distribusi secara komersial maupun melalui proses yang menekankan pada aspek keadilan sosial.
3. Pemikiran merupakan proses memikirkan atau pokok pikiran dari seseorang manusia.
4. Muhammad Baqr Ash-Shadr merupakan seorang cendekiawan muslim yang berasal dari Irak, sekaligus pemikir ekonomi kontemporer (intelektual muslim kontemporer).
5. Relevansi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti hubungan atau kaitan terhadap sesuatu.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam waktu satu tahun..

E. Tinjauan Pustaka

Dari hasil penelusuran Peneliti diketahui bahwa penelitian mengenai Distribusi pendapatan Negara menurut Muhammad Baqr Ash-Shadr masih belum ada yang melakukan penelitian oleh akademisi. Maka untuk menunjang penelitian, peneliti berusaha memaparkan beberapa karya yang relevan, diantaranya:

Moh Nurul Qomar, 2016 dalam jurnal *Iqtishoduna* yang berjudul “Telaah Kritis Masalah Ekonomi Perspektif Muhammad Baqir Ash-Shadr”. Dalam kesimpulan akhir penelitian ini terdapat beberapa hal yang menurut Muhammad Baqr Ash-Shadr merupakan suatu hal yang penting. Baqr Al-Ash-Shadr berpandangan bahwa Allah Swt menyediakan sumber daya alam yang tidak terbatas dan kebutuhan manusia yang sangat terbatas, Sehingga Baqr Ash-Shadr menyimpulkan bahwa pada dasarnya bukan sumber daya alam yang tidak mampu memenuhi kebutuhan manusia akan tetapi adanya kedzaliman yang dilakukan oleh pihak kuat terhadap pihak lemah sehingga terjadi eksploitasi sumber daya alam yang mengakibatkan kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin.²¹

Syafrinaldi dan Riaynol, 2014 dalam *Jurnal Hukum Islam* yang berjudul “Analisa pemikiran Muhammad Baqir Ash-Shadr tentang teori distribusi dan keterkaitannya dengan produksi”. Dalam Penelitian ini fokus pembahasannya mengenai teori distribusi menurut pemikiran Muhammad Baqir Ash-Shadr yang mencakup hak kepemilikan, yaitu kepemilikan terhadap kekayaan primer dan kekayaan sekunder. Di dalam pembahasan ini penulis hanya memaparkan

²¹Moh Nurul Qomar, “Telaah Kritis Masalah Ekonomi Perspektif Muhammad Baqir Al-Sadr”, *Jurnal Iqtishoduna* Vol. 7 No.1, 2016.

keterkaitan distribusi dengan produksi beserta analisisnya dalam pandangan Islam.²²

Siska Lis Sulistiani, 2017 dalam Jurnal Amwaluna, yang berjudul “Distribusi dalam Ekonomi Islam untuk Pembangunan Negara menurut Baqir Ash-Shadr dan M Abdul Mannan”. Dalam penelitian ini fokus pembahasannya mengenai teori distribusi menurut pemikiran Muhammad Baqir Ash-Shadr dan M Abdul Mannan kemudian menganalisa masing-masing pemikiran kedua tokoh dan merelevansikannya hakikat kedua tokoh ini ke dalam pembangunan sebuah negara.²³

Agus Waluyo Nur, 2011 dalam Jurnal Muqtashid yang berjudul “Membangun Sistem Ekonomi berkeadilan: Telaah atas Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr”. Dalam penelitian ini membahas tentang kritik Muhammad Baqir Al-Sadr mengenai sistem ekonomi konvensional dengan paradigma sekulernya yang memisahkan ekonomi positif dan ekonomi normatif, ketiadaan hubungan yang kokoh antara ekonomi mikro dan makro, serta pengabaian nilai-nilai moral dan etika dalam fungsi deskriptif dan prediktifnya. Oleh karena itu Baqir Ash-Shadr hadir dengan doktrin ekonomi Islam yang diyakini mampu melihat berbagai macam persoalan ekonomi.²⁴

Muhammad Kambali, 2018 dalam Jurnal JES yang berjudul “Relevansi Pemikiran Muhammad Baqir Ash-Shadr”. Dalam kesimpulan akhir penelitian ini terdapat beberapa hal yang menurut Muhammad Baqir Ash-Shadr merupakan suatu hal yang sangat penting. Pertama, ekonomi Islam adalah doktrin yang berisi

²²Syafrinaldi dan Riaynol, “Analisa pemikiran Muhammad Baqir Ash-Shadr tentang teori distribusi dan keterkaitannya dengan produksi”, *Jurnal Hukum Islam* Vol. XIV No. 1, 2014.

²³Siska Lis Sulistiani, “Distribusi dalam Ekonomi Islam untuk Pembangunan Negara menurut Baqir Ash-Shadr dan M Abdul Mannan”, *Jurnal Amwaluna* Vol.1 No. 1, 2017.

²⁴Agus Waluyo Nur, “Membangun Sistem Ekonomi berkeadilan: Telaah atas Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr”, *Jurnal Muqtashid* Vol. 2 No. 1, 2011.

aturan dasar dalam ekonomi yang berhubungan dengan ideologi seperti nilai-nilai keadilan. Kedua, persoalan ekonomi bukan disebabkan oleh kelangkaan, karena Allah Maha Adil sehingga tidak akan mungkin dzalim terhadap hamba-Nya dengan membiarkan hamba-Nya hidup tanpa menyediakan kebutuhan mereka. Ketiga, landasan keadilan ekonomi dalam Islam bertumpu pada keadilan distribusi Praproduksi dan Pascaproduksi.²⁵

Yuke Rahmawati, 2015 dalam Jurnal Bisnis dan Manajemen yang berjudul “Posisi Negara dalam menangani kepemilikan publik distribusi tanah milik negara dalam membangun ekonomi masyarakat miskin”. Dalam penelitian ini membahas tentang aturan dan kebijakan distribusi (*land*) yang menyejahterakan masyarakat. Sistem distribusi merupakan bagian kegiatan ekonomi yang mempunyai pengaruh kuat terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat. Karena itu penataan kepemilikan tanah bagi masyarakat tidak mampu, merupakan tugas penting pemerintah dalam rangka melangsungkan hak hidup masing-masing individu masyarakat.²⁶

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, jika dikorelasikan dengan penelitian penulis, menunjukkan bahwa belum terdapat penelitian secara penuh yang membahas tentang teori distribusi pendapatan Negara dalam pemikiran Muhammad Baqr Ash-Shadr. Penelitian-penelitian yang ada sebelumnya, barulah membahas kajian pemikiran Muhammad Baqr Ash-Shadr tentang Teori distribusi secara umum. Untuk itu, dalam penelitian ini, penulis berusaha mengeksplor lebih dalam dan berusaha mempersempit bahasan khusus mengenai distribusi pendapatan Negara dan mencoba menemukan

²⁵Muhammad Kambali, “Relevansi Pemikiran Muhammad Baqir Ash-Shadr”, *Jurnal JES* Vol. 2 No. 2, 2018.

²⁶Yuke Rahmawati, “Posisi Negara dalam menangani kepemilikan publik distribusi tanah milik negara dalam membangun ekonomi masyarakat miskin”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol. 5 No. 2, 2015.

keterkaitan pemikiran distribusi pendapatan menurut Muhammad Baqir Ash-Shadr dengan distribusi pendapatan APBN di Indonesia.

F. Metodologi Penelitian

Dalam menguji sebuah kebenaran diperlukan teori ataupun metode yang berfungsi sebagai petunjuk jalannya pengujian kebenaran²⁷. Demikian pula pada penelitian ini diperlukan sebuah petunjuk dalam menguji kebenaran masalah dalam penelitian. Petunjuk ini berupa langkah-langkah prosedur penelitian yang dikenal dengan metodologi penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian tokoh yang termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) di bidang sejarah. Artinya penelitian ini cenderung mengungkapkan biografi dan juga pemikiran sang tokoh baik tokoh itu masih hidup maupun tokoh itu sudah meninggal, baik melalui wawancara langsung maupun tak langsung dan juga dengan mengadakan penelusuran terhadap hasil karyanya dari naskah-naskah yang pernah ditulis oleh tokoh itu sendiri maupun yang ditulis oleh tokoh lain tentang biografi dan pemikiran tokoh yang akan diteliti²⁸.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder.

- a. Data primer merupakan data yang ditulis langsung oleh objek penelitian yaitu Muhammad Baqr Ash-Shadr. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna yang diterjemahkan oleh Yudi.

²⁷Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 15.

²⁸Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Iqra* 8 No. 1 (2014), h. 70.

- b. Data dan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan²⁹. Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu semua jenis referensi baik berupa buku, jurnal, artikel, manuskrip, skripsi, tesis, disertasi, video dan lain-lain yang tidak ditulis atau dibuat langsung oleh Muhammad Baqr Ash-Shadr namun sesuai dengan objek yang sedang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap orientasi dan tahap eksplorasi.

- a. Tahap orientasi adalah tahap dimana peneliti mengumpulkan data secara umum tentang sang tokoh dan seluruh karya-karyanya dan juga seluruh pemikirannya dalam semua bidang³⁰.
- b. Tahap eksplorasi yaitu tahap dimana seorang peneliti mengumpulkan data-data yang lebih terarah sesuai fokus penelitian atau bidang yang diteliti.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif dengan teknik analisis data yaitu induktif dan deduktif. Metode deskriptif, yaitu dengan menggambarkan secara tepat masalah yang akan diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa³¹.

- a. Induktif, yaitu membahas data-data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat general atau umum dari data-data tersebut.

²⁹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 133.

³⁰Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Iqra* 8, No. 1 (2014), h. 70.

³¹Kazwaini, "Epistemologi Perpajakan dalam Pemikiran Al-Mawardi", *An-nida* 41, No. 1 (2017), h. 86.

- b. Deduktif, yaitu kebalikan dari metode induktif. Metode ini membahas data-data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dari data-data tersebut.

F. Tujuan Penelitian dan kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Sebagai salah-satu syarat meraih gelar sarjana Ekonomi Islam jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar.
2. Sebagai sumber referensi baru dalam membuka kembali diskursus tentang pemikiran Muhammad Baqr Ash-Shadr

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab, dan dalam setiap bab terdiri dari beberapa subbab.

Bab pertama berisi pendahuluan yang merupakan acuan dalam mengantarkan pembahasan skripsi ini secara menyeluruh. Bab ini terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, pengertian judul, kajian pustaka, kerangka teoritis, Metode penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian.

Bab kedua membahas Biografi Muhammad Baqir Ash-Shadr, pendidikan dan karya-karyanya dan karakteristik pemikiran Muhammad Baqr Ash-Shadr.

Bab ketiga membahas distribusi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Indonesia yang meliputi pengertian distribusi dan pendapatan, faktor-faktor distribusi, mekanisme distribusi, sumber-sumber pendapatan, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan, dan menerangkan konsep Anggaran pendapatan dan Belanja Negara dan pendistribusiannya.

Bab keempat membahas pandangan Muhammad Baqr Ash-Shadr tentang konsep distribusi pendapatan Negara dan analisis konsep distribusi pendapatan

Negara Menurut Muhammad Baqr Ash-Shadr dan menganalisis relevansi Pemikiran Muhammad Baqr Ash-Shadr dengan distribusi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Indonesia.

Bab kelima membahas berisi penutup, kesimpulan dan saran-saran yang relevan dengan judul penelitian ini.



BAB II

BIOGRAFI MUHAMMAD BAQR ASH-SHADR

A. *Riwayat Hidup Muhammad Baqr Ash-Shadr*

Nama lengkap Muhammad Baqir Ash-Shadr adalah Muhammad Baqir Ash-Shadr As-Sayyid Haidar Ibn Ismail Ash-Shadr, di lahirkan di Kadhimiyeh, di sebuah daerah di Bagdad pada tahun 1935.¹ Pada tanggal 1 Maret bertepatan pada tanggal 25 Dzul-Qa'dah 1353 H, ia merupakan seorang cendekiawan muslim yang terkemuka, *Fakih* (yuris), dan pemikir genius, karena karya-karya yang telah beliau wariskan kepada kaum muslim, baik kalangan *awam* maupun kalangan terpelajar. Beliau berasal dari suatu keluarga yang sejak satu abad sekarang berada dipusat keilmuan, dan telah menyumbangkan berbagai pelayanan kepada islam dan kaum muslim di Irak, Iran, dan Lebanon. Sayyid Muhammad Baqir Ash-Shadr yang berasal dari keluarga tersebut bangkit melawan kolonialisme inggris dan mengambil bagian dalam revolusi yang terjadi di Irak pada abad ke -20.²

Muhammad Baqr Ash-Shadr, Pada usia empat tahun menjadi yatim, kemudian diasuh oleh ibunya yang religius dan kakak laki-lakinya, Ismail, yang juga seorang Mujtahid kenamaan di Irak (Mujtahid adalah seorang yang sangat alim yang telah mencapai tingkat tertinggi dikalangan teolog muslim). Muhammad Baqr Ash-Shadr menunjukkan tanda-tanda kejeniusannya sejak usia anak-anak. Ketika berusia sepuluh tahun, beliau berceramah tentang sejarah Islam, dan juga tentang beberapa aspek lain yang lain mengenai kultur Islam. Beliau mampu menangkap isu-isu teologis yang sulit dan bahkan tanpa bantuan

¹Nur chamid. "*Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet :1, 2010), h. 321.

²Rian Maulana, "Konsep Distribusi Menurut Muhammad Baqir Ash-Shadr". *Jurnal Al-Iqtishad* Vol. 2 No.2, 2010, h. 83.

seorang guru pun. Pada usia sebelas tahun, beliau mengambil studi logika, dan menulis sebuah buku yang mengkritik para Filosof.

Pada usia tiga belas tahun, kakaknya mengajarkan kepadanya '*Ushul 'ilm al-Fiqh* (asas-asas ilmu tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang terdiri dari atas Al-qur'an, Hadist, ijma', dan qiyas), kemudian pada usia sekitar enam belas tahun, beliau pergi ke Najaf untuk menuntut pendidikan yang lebih tinggi dalam berbagai cabang ilmu-ilmu Islami. Sekitar empat tahun kemudian, beliau menulis sebuah ensiklopedi tentang '*Ushul, Ghayat Al-Fikr fi Al-'Ushul* (pemikiran puncak dalam '*Ushul*). Ketika usia dua puluh lima tahun, beliau mengajar Bahts Kharij (tahap akhir '*Ushul*). Saat itu Sadr lebih muda daripada banyak muridnya. Disamping itu, Sadr juga mengajar *Fiqh*. Patut disebutkan juga bahwa pada usia tiga puluh tahun Sadr telah menjadi mujtahid.

Dalam berbagai ceramahnya beliau kadang menganjurkan suatu gerakan Islam yang teroganisasikan sebuah partai sentral yang dapat bekerjasama dengan berbagai unit dalam naungan kaum Muslim untuk melahirkan perubahan sosial yang diinginkan. Beliau adalah "*Bapak*" *Hizb Al-Da'wah Al-Islamiyyah* (Partai Dakwah Islam). Baqr Ash-Shadr mengajarkan bahwa politik adalah bagian dari Islam. Beliau menyerukan kepada kaum muslim supaya mengenali kekayaan *Khazanah* asli Islam dan melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh eksternal apapun, khususnya pengaruh-pengaruh kapitalisme dan Marxisme. Sadr mendorong kaum Muslim supaya bangun dari tidur dan menyadari bahwa kaum imprealis sedang berupaya membunuh *ideologi* Islam dengan cara menyebarkan ideologi mereka di dunia Muslim. Kaum muslim harus bersatu padu dalam melawan intervensi semacam itu dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik mereka.³Karena kehidupan beliau yang penuh dengan perjuangan, sehingga

³Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Falsafatuna : Pandangan Muhammad Baqir Ash-Shadr terhadap pelbagai Aliran Filsafat Dunia*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1995), h.11.

Muhammad Baqir Ash-Shadr syahid di bunuh oleh Saddam Husein dikarenakan dianggap mengancam kedaulatan negara.

Muhammad Baqr Ash-Shadr banyak menuangkan pikirannya ke surat-surat kabar dan jurnal-jurnal. Banyak juga dalam bentuk buku, terutama dalam bidang ekonomi, sosiologi, teologi, dan filsafat. Dua karya Baqir Ash- Shadr yang sangat terkenal, yaitu *Falsafatuna* dan *Iqtisahduna* di terbitkan tahun 1959 yang meliputi antara lain; 13 kritik komunisme, pemikiran materialis, *Iqtisahduna* diterbitkan tahun 1961 mengkritisi teori ekonomi kapitalisme dan sosialisme.

B. Karya-Karya

Berdasarkan uraian sebelumnya, walaupun pendidikan Muhammad Baqr Ash-Shadr yang dimulai dari sekolah tradisional Irak, namun Baqr Ash-Shadr memiliki tingkat intelektual yang tajam. Beliau merupakan salah satu dari tokoh Islam yang mampu dan berani berbicara dengan fasihnya mengkritisi pemikiran-pemikiran kapitalisme dan marxisme yang mulai berkembang di Iraq pada waktu itu. Fakta ini dapat dilihat dari karya-karya dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, seperti filsafat, ekonomi, Fiqh, Ushul Fiqh, Sosiologi, Sejarah, dan Hukum.

Adapun beberapa karya-karya Baqr Ash- Shadr yang terkenal dari berbagai disiplin Ilmu dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu karya-karyanya dalam bidang ekonomi dan di luar ekonomi.

1. Karya-karya Baqr Ash-sadr dalam bidang ekonomi

Karya besar Baqr Ash-Shadr dalam bidang ekonomi termuat dalam bukunya *Iqtishaduna* (Beirut: Dar al-Fikr, 1973). Secara umum, buku ini memuat tentang kritik terhadap sistem kapitalisme dan marxisme yang mencoba mempengaruhi masyarakat pada waktu itu, dengan menggantikannya dengan madzhab ekonomi Islam.

Karya ekonomi yang lain, *Al-Bank al-Ribawi fi al-Islam* (Kuwait: 1969). Secara umum, buku ini ditulis atas permintaan pemerintahan Kuwait tentang konsep perbankan Islam. Baqr Ash-Shadr kembali mengkritik persoalan riba yang di praktekkan di perbankan, sehingga beliau berusaha menggantikannya dengan perbankan yang terbebas dari sistem bunga. Karena itu, menurut Baqr Ash-shadr prinsip utama untuk menghindari dari praktek perbankan yang bersifat Ribawi ini adalah pentingnya unsur kerja manusia sebagai sumber pemasukan, seperti praktek mudharabah, sebagai lawan dari unsur kapital dalam aktivitas perbankan.

Selain itu, dari kedua buku tersebut, pembahasan Baqr Ash-Shadr seputar ekonomi juga di muat dalam makalah dan risalah, satu dari karya Baqr Ash-Shadr kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris antara lain :

- a. *Al-usus al-ammah li al-bank fi al-mujtama' al-Islami* (Beirut: 1399/1379), atau *Islam and School of Economics* (Karachi Pakistan: Islamic Seminary Publications), dan
- b. *Al-madrasah al-Islamiyyah* (Beirut: 1393/1973),
- c. *Surah' an Iqtishad al-mujtama' al-Islami* (Beirut: 1399/1379),
- d. *Al-janib Al-Iqtishad min al-Nizam al-Islami, Khat al-Tafsiliyyah'an al-Mujtama' al-Islami*, dan
- e. *Al-nizam al-Islami muqaranan bi al-Nizam al-Marksi*.⁴

2. Karya-karya Baqr Ash-Shadr selain Bidang Ekonomi

Karya Baqr Ash-Shadr, selain bidang ekonomi meliputi filsafat, tafsir, sejarah, dan Ushul fiqh. Dalam bidang kajian filsafat, termuat dalam buku *Falsafatuna* (Beirut:1959), dalam buku ini membahas teori pengetahuan (epistemology) dalam pandangan filsafat Islam, sebagai reaksi atas perkembangan

⁴Chibli Mallat, *Menyegarkan Islam dan Kajian Kompherensif Pertama atas Hidup dan Karya Muhammad Baqir Ash-Shadr*, Penerjemah Santi Indra Astuti (Bandung: Mizan, 2001), h. 253.

komunis di Irak, sekaligus menyorong sistem dan terminologi marxis dari dekat. Karya Baqr Ash-shadr yang lain yang sejenis, *al-Usus, al-mantiqiyyah li al-Istiqlal* (Beirut:1391/1972), di mana baqr mencoba untuk menjabarkan bidang logika dengan istilahnya sendiri, yang memuat pembahasan mengenai asas-asas logika dalam induksi yang diperlukan untuk merumuskan teori ilmiah.

Dalam Bidang Ushul Fiqh, Baqr Ash-Shadr banyak menulis karya-karyanya yang lebih maju, beberapa diantaranya dipublikasikan setelah beliau meninggal (wafat). Banyak juga dari karya beliau di rekam oleh muridnya dalam bentuk catatan. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Kazhim al-Husaini, yang mengumpulkan Volume pertama *Mahabith al-Usul* pada 1470/1978. Adapun karya lainnya, *al-ma'alim al-Jadidah fi al-Usul* (Beirut:1385H/1964). Buku ini dipergunakan sebagai pengantar belajar Ushul Fikh di Najaf secara luas, sampai sekarang masih di pergunakan sebagai karya beliau yang menarik di antara karya-karya yang sejenis seperti *fiqh, Al-Fatawa al-wahidah Wifqan li Madhhab Ahl al-Bayt* (Beirut:1976).

Dalam pembahasan bidang politik Islam, Baqr Ash-shadr juga menuangkannya dalam karya diantaranya, *al-'amal wa al-ahdaf*, dan *hawla al-Isam wa al-shakl al-Tanzimi li Hizb al-Da'wah al-Islamiyah*. Sedangkan Pembahasan dalam bidang tafsir, Baqr Ash-Shadr juga menuangkannya dalam bentuk karya diantaranya, *al-Madrasah al-Qur'aniyyah* (Beirut:1979), *Muqaddimah fi al-Tafsir al-Maudu'i al-Qur'an*, *al-Amal fi Al-Qur'an*, dan *al-Huriyah fi Al-Qur'an*.

Adapun pembahasan bidang akhlak, Baqr Ash-shadr juga banyak menulis dan menuangkannya dalam bentuk karya diantaranya, *Dawr al-A'imma fi al-Hayah al-Islamiyyah* (Teheran:1400/1980) dan *khilafah al-Insan wa Syahadah al-Anbiya* (Beirut: 1399/1979). Sedangkan, dalam Bidang teologi, karya Baqr Ash-

shadr diantaranya, *Bahth Hawla al-mahdi* (Beirut:1397/1977), dan *Bahth Hawla al-Wilayah* (Beirut:1397/1977).

Berdasarkan uraian karya yang begitu banyak yang telah ditulis oleh Baqr Ash-shadr, maka dapat dipahami bahwa Baqr Ash-shadr merupakan cendekiawan muslim yang memiliki intelektual yang sangat tajam, hal ini dapat dilihat dari beberapa karya Baqr Ash-shadr yang telah dipublikasikan. Namun sangat disayangkan, karya-karya beliau terkenal setelah Baqr Ash-shadr meninggal (wafat) dihukum gantung. Mulai semenjak itu Baqr Ash-shadr banyak diakui oleh berbagai kalangan masyarakat. Namanya telah melintasi Mediterania, Eropa, dan Amerika Serikat.⁵

C. *Pemikiran Ekonomi Baqr Ash-shadr*

Muhammad Baqr Ash-Shadr merupakan salah satu tokoh pelopor paling awal dalam bidang ekonomi Islam kontemporer, sehingga kemudian pemikirannya di kenal dengan madzhab Iqtishaduna. Karya-karya yang dituangkannya dalam bentuk tulisan membawa Baqr Ash-Shadr kemudian diakui oleh banyak orang, terutama sumbangsih pemikiran dalam sistem ekonomi Islam.

Pemikiran ekonomi Muhammad Baqr Ash-Shadr berakar dari sebuah kritik komparatif terhadap kapitalisme dan Sosialisme,⁶ yang telah gagal dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. Sehingga untuk merealisasikan kesejahteraan masyarakat, Muhammad Baqr Ash-Shadr hadir dengan gagasan original yang mencoba menawarkan gagasan sistem ekonomi Islam yang di gali dari landasan doktrinal Islam, yaitu Al-qur'an dan Hadits.⁷

⁵Chibli Mallat, *Menyegarkan Islam dan Kajian Kompherensif Pertama atas Hidup dan Karya Muhammad Baqir Ash-Shadr*, Penerjemah Santi Indra Astuti (Bandung: Mizan, 2001), h. 183.

⁶Mohammed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Analisis Komparatif Terpilih Diterjemahkan oleh: Suherman Rosyidi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h, 132.

⁷Muhammad Kambali, "Relevansi Pemikiran Muhammad Baqr Ash-Shadr", *JES* Vol 2 No.2 2018, h. 186.

Baqir Ash-Shadr berpandangan bahwa semua teori ekonomi yang dikembangkan oleh ekonom barat tidak mampu menyelesaikan masalah- masalah ekonomi, sehingga beliau berupaya untuk membangun kerangka dasar dengan membuat perbedaan yang signifikan antara ilmu ekonomi dan doktrin ekonomi.

a. Ekonomi dan Iqtishad Menurut Muhammad Baqr Ash-Shadr

Menurut Muhammad Baqr Ash-shadr ekonomi Islam bukanlah sebuah disiplin ilmu, akan tetapi sebuah madzhab atau doktrin yang kemudian direkomendasikan oleh Islam. Sebelum lebih lanjut membahas mengenai konsep konsep ekonomi Baqr Ash-shadr yang ia tawarkan, maka bahasan pertama yang mengawali pemikiran Baqr dalam karya *Iqtishaduna*, yakni perbedaan ilmu ekonomi dengan doktrin (mazhab ekonomi). Dalam bukunya Baqr Ash-shadr mengatakan :

“Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang berhubungan dengan penjelasan terperinci perihal kehidupan ekonomi, peristiwa-peristiwanya, gejala-gejalanya (fenomena-fenomena) lahiriahnya, serta hubungan antara peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomenanya tersebut dengan sebab-sebab dan faktor-faktor umum yang mempengaruhinya”.⁸

Pengertian ilmu ekonomi diatas jika dirujuk ke dalam paradigma konvensional maka akan ditemukan pemikiran ekonomi Samuelson yang menyatakan:

“Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara-cara manusia dan masyarakat dalam menentukan atau menjatuhkan pilihan dengan dan tanpa uang untuk menggunakan sumber-sumber produktif yang langka yang dapat mempunyai penggunaan-penggunaan alternatif untuk memproduksi barang serta membaginya untuk dikonsumsi baik untuk waktu sekarang maupun yang akan datang kepada berbagai golongan dan kelompok masyarakat”.⁹

⁸Muhammad Baqr Ash-shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna* Terj.Yudi, (Cet. I; Jakarta : Zahra, 2008), h. 80.

⁹Paul A Samuelson dan William Nordhaus, *Economics*, (Cet. 16 New York: McGraw-Hill, 1998), h. 4

Sedangkan doktrin (mazhab) ekonomi Menurut Muhammad Baqr Ash-Shadr dalam bukunya menyatakan:

“Doktrin (mazhab) ekonomi merupakan sebuah cara atau metode yang dipilih dan diikuti masyarakat tersebut dalam kehidupan ekonominya serta dalam memecahkan setiap problem praktis yang dihadapinya”.¹⁰

Dalam Pemikirannya Muhammad Baqr Ash-shadr menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang esensial dari kedua terminologi diatas bahwa dalam doktrin ekonomi berisi setiap aturan dasar mengenai kehidupan ekonomi yang berhubungan dengan ideologi nilai-nilai keadilan sosial. Sementara Ilmu ekonomi berisi setiap teori yang menjelaskan realitas kehidupan ekonomi yang terpisah dari ideologi awal atau cita-cita keadilan.¹¹ Karena itu, Baqr Ash-shadr menyimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah sebuah doktrin, bukan merupakan Ilmu pengetahuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam Menurut Muhammad Baqr Ash-shadr dalam bukunya menyatakan:

“Ekonomi Islam merupakan sebuah doktrin dan bukan merupakan sebuah ilmu pengetahuan, karena ia adalah cara yang direkomendasikan Islam dalam mengejar kehidupan ekonomi, bukan suatu penafsiran yang dengannya Islam menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ekonomi dan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya”.¹²

Untuk melihat perbedaan antara ilmu ekonomi dan doktrin ekonomi dapat dipahami melalui contoh berikut. Ketika David Ricardo dalam pemikirannya mengatakan bahwa bagian (*share*) yang di dapat dari buruh dari kekayaan yang dihasilkan dari (*produced wealth*) yang di nilai dengan upah, dalam keadaan apapun jumlahnya tidak akan melebihi apa yang sekedar mencukupi kebutuhan hidup.¹³ Dalam pemikirannya David Ricardo tidak mengemukakan sesuatu yang

¹⁰Muhammad Baqir Ash-shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna* Terj.Yudi, (Cet. I; Jakarta : Zahra, 2008), h. 70.

¹¹Muhammad Baqir Ash-shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna* Terj.Yudi, (Cet. I; Jakarta : Zahra, 2008), h. 84.

¹²Muhammad Baqir Ash-shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna* Terj.Yudi, (Cet. I; Jakarta : Zahra, 2008), h. 80

¹³Dehliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Edisi Ketiga*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 53.

besifat doktrinal, dimana ia tidak bermaksud pemikirannya dapat menjadi sebuah peraturan yang bisa menjadi sistem yang dapat dipakai oleh negara dalam membentuk sistem pembayaran upah, dalam hal kepemilikan privat (*pribadi*) maupun dalam kebebasan ekonomi. Berdasarkan uraian pemikiran David Ricardo diatas, dapat dipahami bahwa dalam pemikirannya ia hanya menjelaskan realitas yang dijalani oleh para buruh dan hasil niscaya dari realitas itu.¹⁴

Muhammad Baqr Ash-Shadr mengemukakan bahwa ada tiga faktor yang membedakan antara ilmu ekonomi dengan madzhab ekonomi (doktrin ekonomi), yaitu:

- 1) Ilmu ekonomi dan doktrin ekonomi (mazhab ekonomi) mempunyai tujuan yang berbeda, dimana tujuan ekonomi adalah untuk menemukan fenomena eksternal kehidupan ekonomi, sedangkan tujuan dari mazhab ekonomi (doktrin ekonomi) adalah menyusun suatu sistem berdasarkan keadilan sosial (al-'adalah al-Ijtima'iyah) yang sanggup mengatur kehidupan ekonomi umat manusia.
- 2) Mazhab atau doktrin ekonomi merupakan sebuah sistem, sedangkan ilmu ekonomi merupakan sebuah interpretasi atau penafsiran.
- 3) Mazhab ekonomi dan ilmu ekonomi, pada dasarnya mempunyai tujuan serta metode yang berbeda, akan tetapi dalam materi pembahasan dan ruang lingkupnya mempunyai kesamaan, dimana saat bersamaan dalam membahas produksi, distribusi dan konsumsi, seseorang akan membahas pula mengenai doktrin ekonomi dan ilmu ekonomi sekaligus.

Baqr Ash-shadr memahami ekonomi Islam sebagai bagian dari sistem umum Islam yang menyelenggarakan segala aspek dalam kehidupan

¹⁴Muhammad Baqir Ash-shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna* Terj. Yudi, (Cet. I; Jakarta : Zahra, 2008), h. 82-83.

masyarakat.¹⁵ Islam sebagai seperangkat aturan datang bukan untuk menemukan fenomena kehidupan di dalam aktivitas ekonomi dan sebab-sebabnya, ia pun tidak semestinya diharapkan untuk menyatakan hukum-hukum ilmu ekonomi, akan tetapi Islam hanya datang untuk mengatur kehidupan ekonomi dengan tujuan menyusun sebuah sistem yang berdasarkan keadilan sosial.

Keadilan pada dasarnya bukan sebuah gagasan ilmiah, namun ketika keadilan dan sebuah gagasan digabungkan maka ia akan mendapatkan label doktrinal yang akan melekat padanya dan membuatnya berbeda dari pemikiran ilmiah, sehingga dapat disimpulkan bahwa ia termasuk doktrin karena merupakan sesuatu yang sangat ditekankan oleh sebuah ideologi.¹⁶ Sehingga prinsip kepemilikan privat, kebebasan ekonomi, penghapusan sebuah sistem bunga, atau nasionalisasi sarana-sarana produksi, semuanya termasuk doktrin karena mereka terkait dengan gagasan keadilan. Sementara hukum hasil yang berkurang (*law of diminishing returns*), kemudian hukum suplai yang berkurang (*law of diminishing returns*), kemudian hukum suplai dan permintaan (*law supply and demand*), atau hukum-besi upah (*iron law of wages*), semua ini merupakan aturan ilmiah karena tidak menyangkut dengan evaluasi fenomena-fenomena ekonomi itu. Hukum hasil yang berkurang tidak bisa menentukan apakah hasil yang berkurang atau tidak. Hal ini karena ia hanya mengungkapkan hasil yang berkurang itu sebagai sebuah fakta objektif yang tetap. Demikian pula, hukum suplai dan permintaan tidak bisa menyatakan adil atau tidaknya naiknya harga akibat kelangkaan suplai atau permintaan peningkatan. Karena ia hanya menunjukkan sebuah hubungan objektif

¹⁵Nabila Zatadini dan A'yun Nadhira, "An Exploratory Study on Islamic Economics As a Science", *International Conference on the Role of Afro-Asian Universities in Building Civilization: Paper*, (Universitas Darussalam Gontor Press, 2018), h. 567.

¹⁶Muhammad Baqir Ash-shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna* Terj. Yudi, (Cet. I; Jakarta : Zahra, 2008), h. 85.

yang berbanding terbalik dengan harga dan kuantitas suplai serta permintaan sebagai salah satu konsekuensi pasti dari pasar kapitalis.

Berdasarkan hukum-besi upah, ia hanya mengungkapkan realitas positif dimana para buruh selalu menerima upah yang tidak jauh dari level “sekadar bisa mempertahankan hidup”. Hal ini tidak mempermasalahkan adil atau tidaknya bagian para buruh yang begitu kecil. Karena, faktanya semua hukum ilmiah tidak didasarkan pada ideologi keadilan, mereka hanya didasarkan pada deduksi (kesimpulan) yang diambil dari kenyataan yang ada serta pengamatan terhadap berbagai manifestasinya yang berbeda. Hal ini tentu berbeda dengan hukum-hukum doktrinal, yang selalu melekat pada suatu ideologi keadilan tertentu.¹⁷

b. Karakteristik Ekonomi Islam

Berdasarkan definisi ekonomi Islam yang telah diuraikan diatas, Muhammad Baqr Ash-shadr kemudian merumuskan karakteristik ekonomi Islam yang kemudian membedakan sistem ekonomi Islam (mazhab) dengan sistem ekonomi yang lain, karakteristik tersebut terdiri dari tiga prinsip, yang dalam bahasa Muhammad Baqr Ash-shadr disebut dengan *al-Arkan al-Ra'isiyyah*, ketiga prinsip tersebut merupakan *Multiple Ownership*, *Freedom to Act*, dan *Social Justice*.

1) *Mabda' al-Milkiyyah al-Muzdawijah* (*Multiple Ownership* atau Prinsip kepemilikan Multi jenis).

Berdasarkan prinsip kepemilikan di dalam Islam terdapat implikasi yang sangat penting dari pandangan Islam melalui konsep kebebasan. Dimana tiga prinsip kepemilikan kemudian diyakini dapat beroperasi di wilayahnya sendiri-sendiri. Baqr Ash-shadr menegaskan bahwa berbagai bentuk kepemilikan itu merupakan ungkapan dari suatu perencanaan

¹⁷Muhammad Baqir Ash-shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna* Terj. Yudi, (Cet. I; Jakarta : Zahra, 2008), h. 85.

agama, yang kemudian terletak di dalam suatu kerangka makna dan nilai yang khusus. Bentuk kepemilikan tersebut antara lain:

- (a) *Al-Milkiyah al-Khashshah (Private Ownership* atau Kepemilikan Pribadi).

Kepemilikan pribadi atau *Private Ownership* merupakan kepemilikan di mana seorang pribadi (individu) atau pihak tertentu berhak menguasai suatu properti secara eksklusif dan berhak mencegah individu atau pihak lain dari menikmati manfaat dalam bentuk apa pun dari properti tersebut kecuali bila ada kebutuhan atau keadaan yang meniscayakan demikian. Contoh kepemilikan pribadi adalah kayudari hutan yang ditebang sendiri oleh seseorang.¹⁸

Dalam hal ini, Muhammad Baqr Ash-shadr sepakat dengan seluruh tokoh ekonomi Islam klasik dan kontemporer bahwa yang dimiliki oleh manusia hanyalah sebatas kepemilikan sementara, sedangkan kepemilikan mutlak pada dasarnya ialah Allah Swt.

- (b) Kepemilikan Negara (*State ownership/al-milkiyah al-Daulah*)

Kepemilikan Negara merupakan jenis kepemilikan hak atas penguasaan properti milik pemegang mandat ilahiah negara Islam, yakni Nabi Muhammad Saw, atau imam. Misalnya, penguasaan atas tambang, sebagaimana diriwayatkan dalam sejumlah teks hukum.¹⁹

- (c) Kepemilikan Publik (*publik ownership/Al-milkiyyah al-ammah*)

Kepemilikan publik merupakan jenis kepemilikan hak atas penguasaan properti milik umat atau masyarakat secara keseluruhan.

¹⁸ Muhammad Baqr Ash-shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna* Terj. Yudi, (Cet. I; Jakarta : Zahra, 2008), h. 148.

¹⁹ Muhammad Baqr Ash-shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna* Terj. Yudi, (Cet. I; Jakarta : Zahra, 2008), h. 147.

Kepemilikan publik tersebut terbagi atas dua, yaitu kepemilikan ummat (*Milkiyyah al-ummah*), dan kepemilikan masyarakat (*Milkiyyah An-Nas*). *Milkiyyah al-ummah* (kepemilikan umat) merupakan salah satu kepemilikan publik yang hak atas penguasaan propertinya milik keseluruhan umat Islam. Misalnya, penguasaan atas properti yang didapat dari perang suci (jihad). Sedangkan kepemilikan Masyarakat (*Milkiyyah An-Nas*) merupakan salah satu kepemilikan publik yang berkenaan dengan hak kepemilikan properti yang terlarang bagi seorang individu untuk memilikinya atau menguasainya secara eksklusif secara pribadi, sementara seluruh masyarakat (tidak terbatas pada kaum muslim, namun juga mencakup non-muslim yang hidup di dalam naungan negara Islam) diizinkan untuk mengambil manfaat serta memperoleh keuntungan darinya, seperti laut dan sungai (aliran air) alam.²⁰

2) *Mabda' al-Hurriyyah al-Iqtishadiyah fi Nithaq Mahdud/Freedom to Act*

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa Islam mengakui kepemilikan individu dalam aktivitas ekonomi begitu pula hak-hak individu. Karena menurut Baqr Ash-Shadr dengan memberikan mengakui kepemilikan beserta hak-hak individu yang melekat darinya maka ini akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian yang baik. Namun, dalam Islam konsep kebebasan dalam menciptakan mekanisme pasar dalam ekonomi tidak sama dengan konsep kebebasan yang dipahami oleh sistem kapitalisme. Kebebasan dalam ekonomi merupakan kebebasan yang dibatasi, setidaknya ada dua batasan yang

²⁰Mohammed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Analisis Komparatif terpilih*, Terj. Suherman Rosyidi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 138.

ditetapkan Islam yang dengannya kebebasan diatur oleh Islam dalam interaksi masyarakat, khususnya dibidang ekonomi, yaitu:

- (a) *Self Imposed (Tahdid Dzati)*, merupakan sebuah batasan norma serta nilai yang berasal dari dalam individu muslim yang menghalangi mereka untuk membuat sesuatu yang dilarang tanpa merasa kehilangan kebebasan mereka sendiri.
- (b) *Socially Enforced (Tahdid Maudhu'i)*, merupakan sebuah batasan berupa larangan luar seperti:
 - (1) Larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh nash-nash syara' seperti: larangan Gharar, Riba, Ihtikar, Tadlis, dan Ikrah.
 - (2) Larangan yang dikeluarkan oleh Negara sebagai waliyyul amr' sebagai pemegang otoritas kekuasaan, seperti intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi yang dipandang mengganggu kepentingan orang lain.

Muhammad Baqr Ash-Shadr menolak pandangan kapitalisme yang menyatakan “keselarasan kepentingan” yang menjadi penekanan sistem kapitalisme dalam memberikan kebebasan individu.²¹ Baqr Ash-Shadr tidak mengakui pandangan kapitalisme yang menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat atau umum akan meningkat secara maksimum ketika para individu diberi kebebasan untuk mengejar kepentingan masing-masing, menurutnya ketika kebebasan individu itu dibiarkan begitu saja akan berdampak kepada masalah ekonomi. kenyataannya bahwa apabila kebebasan itu diberikan tanpa batas, individu cenderung lebih mementingkan pemenuhan haknya daripada kepentingan masyarakat.

²¹F.X. Bhakti Hendrakusuma, “Kajian Teori Distribusi dalam Ekonomi Syariah”, *Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhanan*, Vol. 8 No. 2, 2018, h. 169.

Berkaitan dengan hak pemenuhan kebutuhan tersebut, bahwasanya setiap orang atau individu mempunyai hak untuk mengeksploitasi segala sumber daya ekonomi yang ada, hal ini bertentangan dengan pemikirannya sendiri (kapitalisme) yaitu sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Negara sebagai *waliyyul amr*' tidak mempunyai hak untuk mengekang setiap individu tersebut dalam menjalankan berbagai aktivitas. Hal ini kemudian diperparah, ketika tidak adanya nilai moral dalam mengarahkan aktivitas ekonomi setiap individu.

3) *Sosial Justice (Mabda'al-Adalah'al-Ijtima'iyah)*

Keadilan merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem ekonomi Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan suatu perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, dan proporsional.²² Di dalam al-qur'an anjuran untuk berlaku adil dapat dilihat dalam surah Al-Nisa ayat 58, Surah Al-An'am ayat 150, Surah An-Nahl ayat 90, Surah Al-A'raf ayat 28-29, dan Surah Al-Hadid ayat 25.

Pembahasan keadilan dalam sistem ekonomi Islam bukan satu-satunya sistem ekonomi yang menyinggung masalah keadilan, akan tetapi sistem ekonomi seperti Sosialisme, maupun kapitalisme juga membahas tentang keadilan, masing-masing sistem ekonomi mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan sistem perekonomian yang adil, namun juga mempunyai penafsiran yang berbeda tentang konsep keadilan.

Konsep keadilan menurut sistem ekonomi sosialisme adalah ketika masyarakat dapat menikmati barang dan jasa dengan sama rasa dan sama

²²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 6-7.

rata (*No one has a privilege to get more than others*) yang diterjemahkan dalam prinsip *from each according to his ability, to each according to his needs*. Sedangkan dalam sistem ekonomi kapitalis, konsep keadilan dipahami apabila setiap individu mendapatkan apa yang menjadi haknya (*you get what you deserve*).²³

Sedangkan dalam Islam, keadilan diartikan dengan suka sama suka (*an taradin minkum*) dan disisi lain pihak yang satu yang tidak menzalimi pihak yang lain (*la tazlimun wa la tuzlamun*). Islam dalam muara keadilan sosialnya menjadikan jaminan pemenuhan sebagai dasar perwujudan keseimbangan sosial di tengah masyarakat sebagaimana yang dikatakan Baqr Ash-shadr:

“Gambaran Islam tentang keadilan sosial mengandung dua prinsip umum yang masing-masing memiliki garis dan rincian tersendiri, yaitu prinsip jaminan sosial umum dan prinsip keseimbangan sosial”.²⁴

c. Pandangan islam tentang Masalah Ekonomi

Menurut Muhammad Baqr Ash-shadr bahwa pada dasarnya masalah-masalah ekonomi muncul bukan disebabkan oleh kelangkaan sumber-sumber material ataupun terbatasnya kekayaan alam. sebagaimana firman Allah Swt yang termaktub dalam Q.S. Al-Qamar: 54/49.

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

Terjemahan:

“Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran”.(Q.S. Al-Qamar: 54/49).²⁵

²³Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 36.

²⁴Ubay, “Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Baqir Sadr”, *Jurnal Hunafa* Vol. 2 No. 3, 2005, h. 5.

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Furqon*, (Jakarta : PT Citra Mulia Agung, 2015), h. 528.

Muhammad Quraishy Shihab menafsirkan bahwa kata *qadar* pada ayat diatas, dari segi bahasa kata tersebut dapat berarti *Kadar tertentu* yang tidak bertambah atau berkurang, atau berarti *kuasa*. Tetapi karena ayat tersebut berbicara tentang segala sesuatu yang berada dalam kuasa Allah, maka adalah lebih tepat memahaminya dalam arti *ketentuan* dan *sistem yang telah ditetapkan terhadap segala sesuatu*. Tidak hanya terbatas pada salah satu aspeknya saja.²⁶

Dari ayat sebelumnya kemudian di perkuat dalam firman Allah Swt Q.S. Ibrahim: 14/32-34.

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآبِّينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَعَدَّ لَكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

Terjemahan:

Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah). (Q.S. Ibrahim: 14/32-34).²⁷

Menurut Muhammad Baqr Ash-shadr terkait dengan Surah Ibrahim diatas, mengatakan bahwa permasalahan ekonomi muncul karena disebabkan oleh dua

²⁶M. Quraishy Shihab. “*Tafsir Al-Misbah Volume 3 Pesan, Kesan & Keserasian Al-Qur’an*”, (Ciputat: Lentera Hati, 2002), h. 482.

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah Al-Furqon*, (Jakarta : PT Citra Mulia Agung, 2015), h. 259-260.

faktor yang mendasar. Pertama, adalah karena perilaku manusia yang melakukan kezaliman dan kedua, karena mengingkari nikmat Allah Swt.²⁸

Dzalim disini dimaksudkan dalam *realitas empiris*, dimana manusia dalam aktivitas distribusi cenderung melakukan kecurangan-kecurangan untuk memperoleh keuntungan pribadi semata, seperti melakukan tindakan penimbunan atau *ikhhtikar*.²⁹ Sedangkan *Ingkar* yang dimaksud adalah manusia yang cenderung menafikan nikmat Allah Swt dengan semena-mena mengeksploitasi sumber-sumber alam. Hal ini kemudian disimpulkan Baqr Ash-shadr bahwa faktor yang mendasar yang sebutkan diatas, merupakan hal yang dominan yang akan menimbulkan lahirnya permasalahan ekonomi di dalam kehidupan manusia. Menurutnya masalah tersebut dapat diatasi dengan mengakhiri kezaliman dan keingkaran manusia. Salah satu cara yang ditawarkan Baqr Ash-shadr adalah dengan menciptakan hubungan yang baik antara distribusi dan *mobilisasi* segenap sumber daya alam *material* untuk memakmurkan alam serta menyibak segala kekayaannya.³⁰

d. Teori Produksi

Dalam pembahasan aktivitas produksi Muhammad Baqr Ash-shadr, mengklasifikasikan dua aspek yang mendasari terjadinya aktivitas produksi, antara lain:³¹

a) Aspek Objektif atau Aspek Ilmiah

²⁸Moh Nurul Qomar, "Telaah Kritis Masalah Ekonomi Perspektif Muhammad Baqir Al-Sadr", *Jurnal Iqtishoduna* Vol. 7 No. 1, 2016, h. 10.

²⁹Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 326.

³⁰Muhammad Baqir Ash-shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna* Terj. Yudi, (Cet. I; Jakarta : Zahra, 2008), h. 430-431.

³¹Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 327.

Aspek Objektif atau Aspek Ilmiah berhubungan dengan sisi teknis dan ekonomis yang terdiri atas sarana-sarana yang digunakan, kekayaan alam yang diolah, dan kerja yang dicurahkan dalam aktivitas produksi. Aspek Objektif ini berusaha untuk menjawab masalah-masalah efisiensi teknis dan ekonomis yang berkenaan dengan tiga pertanyaan dasar yaitu dengan istilah *The Three Fundamental Economic Problem* yang meliputi: *What, How, and For Whom*.³²

b) Aspek Subjektif

Aspek Subjektif merupakan aspek yang terdiri atas motif psikologis, yaitu tujuan yang hendak dicapai lewat aktivitas produksi, dan evaluasi aktivitas produksi menurut berbagai konsepsi keadilan yang dianut. Sisi objektif aktivitas produksi merupakan subjek kajian ilmu ekonomi baik secara khusus maupun dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan lainnya guna menemukan hukum-hukum umum yang mengendalikan sarana-sarana produksi dan kekayaan alam supaya dalam suatu kondisi manusia dapat menguasai hukum-hukum tersebut dan memanfaatkannya untuk mengorganisasi sisi objektif produksi secara lebih baik.

Menurut Baqr Ash-shadr sumber asli produksi diinterpretasikan ke dalam tiga kelompok yang terdiri atas alam, modal, dan kerja. Sehingga sumber daya alam dipergunakan untuk aktivitas produksi ke dalam tiga kelompok juga yang terdiri atas tanah, subgtansi-subgtansi primer, dan aliran air.³³

³²Mohammed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Analisis Komparatif terpilih*, terj. Suherman Rosyidi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 148.

³³Rustam Efendi, *Produksi dalam Islam*, (Yogyakarta: Megistra Insania, 2003), h. 8

Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan produksi Baqr Ash-shadr menawarkan dua strategi. Strategi tersebut terdiri atas strategi *doctrinal* atau *Intelektual* dan strategi *legislatif* atau hukum.

(1) Strategi *doctrinal* atau Intelektual³⁴

Strategi *doctrinal* atau intelektual merupakan strategi yang bertolak pada asumsi bahwa manusia termotivasi untuk bekerja keras dipandang ibadah jika dilaksanakan dengan pemahaman dan niat seperti yang dinyatakan dalam al-qur'an. Membiarkan sumber-sumber menganggur, dan melakukan upaya pemborosan atau *mubadzir* atau memproduksi barang-barang yang haram adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam.

(2) Strategi hukum atau *legislative*³⁵

Dalam pembahasan strategi *legislative* atau hukum, maka diperlukan aturan hukum yang memback-up strategi *doctrinal* tersebut. Aturan hukum yang kemudian ditawarkan Muhammad Baqr Ash-shadr antara lain:

- a) Tanah yang menganggur dapat disita oleh negara dan mendistribusikannya kepada orang lain yang mampu dan mau menggarapnya.
- b) Larangan terhadap *Hima* yakni memiliki tanah dengan paksa.
- c) Larangan kegiatan transaksi yang tidak produktif, seperti membeli murah dan menjualnya dengan harga yang mahal tanpa bekerja.

³⁴Muhammad Kambali, "Relevansi Pemikiran Muhammad Baqir Ash-Sadr", *JES* Vol 2. No. 2, 2018, h. 188.

³⁵Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 328.

- d) Pelarangan *riba*, *ikhtikar*, pemusatan *sirkulasi* kekayaan dan melakukan tindakan yang berlebihan atau *mubadzir*.
- e) Melakukan regulasi pasar dan mengontrol situasi pasar.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, dapat dipahami bahwa sarana-sarana diatas yang diberikan Islam merupakan sebuah doktrin dalam pertumbuhan produksi dan meningkatkan kekayaan. Karena itu, negara sebagai *waliyyul amr*' diberikan amanah untuk mengkaji berbagai situasi dan kondisi objektif kehidupan ekonomi. selain melakukan survey terhadap kekayaan alam apa saja yang dimiliki negara dan mengkaji secara kompherensif tenaga kerja dalam masyarakat serta berbagai kesulitan dan kehidupan yang mereka jalani.

Hal ini, yang kemudian mendasari pemikiran Muhammad Baqr Ash-shadr mengenai hubungan antara agama dan kebijakan ekonomi negara merupakan satu kesatuan yang utuh. Karena itu, negara dapat mematok jangka waktu tertentu seperti 5 tahun untuk mencapai tujuan atau target tersebut. Kebijakan ekonomi seperti ini bukan merupakan unsur pokok agama dan formulasinya, akan tetapi yang menjadi penentu dari hasil ialah pembumian nilai-nilai syari'ah oleh pemerintah.³⁶

e. Distribusi Kekayaan

Dalam Pemikiran Muhammad Baqr Ash-shadr, distribusi kemudian dibagi menjadi dua tingkatan diantaranya:

- a. Distribusi Pra produksi (sumber-sumber produksi)

³⁶Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 329.

Distribusi sumber-sumber produksi yang terdiri atas tanah, bahan-bahan mentah, alat-alat dan mesin yang dibutuhkan untuk memproduksi beragam barang dan komoditas.³⁷

b. Distribusi Pasca Produksi (Kekayaan Produktif)

Distribusi Kekayaan Produktif merupakan distribusi hasil dari proses pengolahan atau hasil dari aktivitas produksi melalui kombinasi sumber-sumber produksi yang dihasilkan manusia melalui kerja.³⁸

Berdasarkan pembahasan distribusi kekayaan diatas, Baqr Ash-shadr menekankan adanya sirkulasi kekayaan dan keseimbangan harta di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

f. Tanggung Jawab Negara dalam Ekonomi Islam

Pemikiran Muhammad Baqr Ash-shadr mengenai tanggung jawab negara dalam ekonomi, tidak terlepas dengan pemikiran tentang Islam. Islam merupakan sebuah pondasi yang kemudian menjamin tegaknya dakwah dalam mengatur seluruh kehidupan khususnya dalam bidang ekonomi. Tanggung jawab negara dalam menerapkan ajaran-ajaran agama Islam dalam bidang ekonomi sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan, sistem ekonomi Islam bukanlah sistem ekonomi konvensional yang bebas nilai, sedangkan ekonomi Islam sangat erat kaitannya dengan nilai moral. Nilai moral dalam aktivitas kehidupan ekonomi dimasyarakat harus ditegakkan karena itu partisipasi dari semua pihak sangat diperlukan.

Negara sebagai *waliyyul amr'* (kepala negara) mempunyai peran untuk memastikan dan mengawasi tindakan serta sikap masyarakat. peran negara dalam bidang ekonomi sangat erat kaitannya dengan prinsip kepemilikan, dimana

³⁷Muhammad Kambali, "Relevansi Pemikiran Muhammad Baqir Ash-Sadr", *JES* Vol 2. No. 2, 2018, h. 189.

³⁸Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 329.

kepemilikan negara merupakan salah satu bentuk kepemilikan dalam prinsip *Multiple Ownership*. Adapun tanggung jawab negara dalam bidang ekonomi antara lain:

1. Jaminan sosial di dalam masyarakat

Islam telah menugaskan negara untuk menyediakan jaminan sosial di dalam masyarakat guna memelihara standar hidup seluruh masyarakat Islam. Kewajiban negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat bukan hanya memberikan kebutuhan hidup pokok saja, akan tetapi negara mempunyai kewajiban untuk memberikan jaminan terhadap kehidupan individu agar sesuai dengan standar hidup masyarakat Islam. Maksudnya apabila secara umum standar hidup masyarakat Islam meningkat, maka setiap individu harus meningkat pula standar hidupnya. Hal ini yang kemudian menjadi dasar, negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok individu, seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Selain memenuhi kebutuhan pokok, negara juga mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan individu diluar kebutuhan pokok, yaitu segala kebutuhan yang pemenuhannya mempunyai kebutuhan individu berada dalam masyarakat Islam.³⁹

Jaminan sosial mempunyai prinsip yang didasarkan pada dua basis doktrinal. Pertama, keharusan bagi seorang muslim atau masyarakat untuk membantu sebagian orang bagi sebagian lainnya. Kedua, masyarakat mempunyai hak atas kekayaan publik yang dikuasai oleh negara. Berkenaan dengan dua basis doktrinal diatas memberikan pemahaman bahwa kedua basis tersebut mempunyai batas dan urgensinya masing-masing dalam memenuhi setiap kebutuhan yang berkaitan dengan penetapan standar hidup yang umum yang dijamin dan prinsip jaminan sosial bagi setiap individu di dalam masyarakat.

³⁹Muhammad Baqir Ash-shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna* Terj.Yudi, (Cet. I; Jakarta : Zahra, 2008), h. 459-460.

Fungsi negara dalam mengimplementasikan prinsip kewajiban timbal balik masyarakat sebenarnya mencerminkan peran negara dalam memaksa warganya untuk mematuhi apa yang telah digariskan oleh syari'ah, dalam memastikan agar kaum muslim mematuhi hukum-hukum Islam. Islam mewajibkan agar kaum muslim yang memeluk agama Islam dengan penuh keyakinan agar membantu saudara yang membutuhkan. Sebagaimana dalam firman Allah Swt yang termaktub dalam Q.S. Al-Maun: 102/1-3.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ

Terjemahan:

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?, Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. (Q.S. Al-Maun: 102/1-3).⁴⁰

Dalam Surah Al-Maarij ayat 24-25 Allah Swt berfirman:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahan:

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)”. (Q.S. Al-Maarij: 70/24-25).⁴¹

Kewajiban untuk membantu saudara yang membutuhkan merupakan kewajiban bersama (*Fardhu Kifayah*) yang kemudian harus ditunaikan dalam batas-batas kemampuan dan kekuasaan kita.⁴² Ia harus menunaikan kewajiban ini sebagaimana dalam menunaikan seluruh kewajiban yang lain.

⁴⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Furqon*, (Jakarta : PT Citra Mulia Agung, 2015), h. 602.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Furqon*, (Jakarta : PT Citra Mulia Agung, 2015), h. 569.

⁴²Muhammad Baqir Ash-shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna* Terj. Yudi, (Cet. I; Jakarta : Zahra, 2008), h. 456.

Hal ini, sebagaimana negara berhak memaksa kaum muslim untuk berjihad, ia berhak juga memaksa untuk membantu dan menolong orang-orang yang tidak berkemampuan (cacat).⁴³ Dengan pemenuhan hak kewajiban tersebut lewat pengimplementasian jaminan dalam bentuk uang yang cukup, hal ini tentunya merupakan sebuah bentuk penunaian kewajiban kepada Allah Swt.

Berkaitan dengan hak atas penguasaan kekayaan publik yang dikuasai negara, bahwa dalam prinsipnya negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan individu dikarenakan adanya hak masyarakat terhadap penguasaan kekayaan yang dikuasai oleh negara.

Menurut Muhammad Baqr Ash-Shadr dalam pemikirannya bahwa prinsip jaminan sosial dilakukan dengan bentuk yaitu:

- a) Negara harus memberikan kesempatan yang luas untuk melakukan kerja produktif sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari kerja dan usahanya sendiri.
- b) Individu yang tidak mampu melakukan kerja produktif, negara mempunyai kewajiban mengaplikasikan jaminan sosial bagi setiap kelompok dalam bentuk uang tunai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk memperbaiki standar kehidupannya.

2. Menciptakan Keseimbangan Sosial

Keseimbangan Sosial merupakan keseimbangan standar hidup di antara para individu dalam masyarakat, bukan keseimbangan pendapatan. Maksudnya uang harus tersedia dan berputar di antara para individu sedemikian hingga masyarakat mampu hidup dalam satu standar hidup yang umum. Sebagaimana dalam firman Allah Swt yang termaktub dalam Q.S. Al-Hasyr: 59/7:

⁴³Muhammad Baqir Ash-shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna* Terj. Yudi, (Cet. I; Jakarta : Zahra, 2008), h. 457.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan:

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”. (Q.S. Al-Hasyr: 59/7).⁴⁴

Menurut Quraissy Shihab, ayat tersebut bermaksud untuk menegaskan bahwa harta benda harus beredar di masyarakat, sehingga dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat dengan tetap mengakui hak kepemilikan dan melarang monopoli, karena sejak awal Islam menetapkan harta memiliki fungsi sosial.⁴⁵

Dalam rangka mewujudkan keseimbangan sosial tersebut, maka Islam memberikan instrumen berupa kewajiban membayar pajak dan zakat lain, seperti *khums*, *kharaj*, *fay*, dan *Anfal*, dan lain sebagainya. Untuk mewujudkan keseimbangan sosial di dalam masyarakat, tergambar pada makna kata *Iqtishad*. Kata *Iqtishad* yaitu derivasi dari kata *qashada*, memiliki arti pertengahan atau seimbang (*al-wasthu baina amrain*). Karena itu, setiap tindakan dalam aktivitas ekonomi hendaknya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan (*needs*), bukan untuk memuaskan keinginan (*wants*). Berdasarkan uraian pembahasan diatas, dapat dipahami bahwa di samping mewujudkan keseimbangan secara individu, *Iqtishad* juga mempunyai tujuan untuk mewujudkan keseimbangan sosial (*equilibrium*) di tengah masyarakat. Hal yang demikian tentunya berbeda dalam pandangan sosialis tentang keseimbangan sosial.

⁴⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Furqon*, (Jakarta : PT Citra Mulia Agung, 2015), h. 545.

⁴⁵M. Quraissy Shihab. “*Tafsir Al-Misbah Volume 14*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 525.

Menurut Muhammad Baqr Ash-shadr tentang keseimbangan sosial didasarkan pada asumsi dasar. Yaitu fakta *Haqiqah Kauniyyah* (fakta kosmik) dan Fakta *Haqiqah Mazhabiyah* (fakta doktrinal). Fakta kosmik adalah perbedaan yang eksis diantara para individu manusia berkenaan dengan kecakapan mental (intelektual) dan fisik, serta kecendrungan (bakat). Perbedaan yang terdapat pada individu tersebut akan melahirkan perbedaan yang lain dalam masyarakat. Hal, inilah yang disebut strata sosial. Perbedaan tersebut bukanlah hasil dari proses sejarah yang sifatnya aksidental seperti yang dipahami kaum sosialis (Marx).

Sedangkan Fakta *Haqiqah Mazhabiyah* (fakta doktrinal) merupakan hukum distribusi yang menyatakan bahwa kerja yaitu basis dari properti privat beserta hak apa pun atasnya. Perbedaan kuantitas dan kualitas dalam kerja akan berdampak pada perbedaan penghasilan. Berdasarkan dua asumsi dasar yang telah diuraikan diatas, Baqr Ash-shadr menyimpulkan:

“Keseimbangan Sosial merupakan keseimbangan sosial standar hidup di antara para Individu dalam masyarakat, bukan keseimbangan pendapatan”.⁴⁶

Sebagaimana Islam telah memformulasikan prinsip keseimbangan sosial, ia juga telah melengkapi negara dengan wewenang yang diperlukan dalam usaha mengaplikasikan prinsip tersebut. Esensi dari wewenang tersebut dapat disimpulkan dalam poin berikut ini:⁴⁷

- a) Pemberlakuan pajak-pajak permanen yang sinambung dan memanfaatkan pajak-pajak itu demi kepentingan keseimbangan sosial.
- b) Menciptakan sektor-sektor publik dengan properti negara dan menjadikannya sebagai investasi yang menguntungkan, di mana keuntungan itu dimanfaatkan demi kepentingan keseimbangan sosial.

⁴⁶Muhammad Baqr Ash-shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna* Terj.Yudi, (Cet. I; Jakarta : Zahra, 2008), h. 469.

⁴⁷Muhammad Baqr Ash-shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna* Terj.Yudi, (Cet. I; Jakarta : Zahra, 2008), h. 474.

- c) Aturan-aturan hukum Islam yang meregulasi berbagai bidang yang berbeda dalam kehidupan ekonomi.

3. Intervensi negara dalam Bidang Ekonomi

Seluruh kewenangan maupun kekuasaan secara kompherensif dan umum diberikan kepada negara untuk mengintervensi aktivitas di dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Hal ini, dipandang sebagai salah satu prinsip yang paling mendasar dari sistem ekonomi Islam.

Dalam menjalankan perannya sebagai negara, negara bukan hanya hadir untuk sekedar mengeluarkan aturan hukum Islam yang permanen, akan tetapi negara hadir mengisi kekosongan yang ada dalam hukum Islam. Dimana ruang lingkup perannya, yaitu mendesak masyarakat agar mengadaptasi elemen-elemen statis hukum Islam yang dibuatnya, dan merancang elemen-elemen dinamis guna mengisi kekosongan yang ada dalam hukum Islam, sesuai dengan kondisi yang ada.⁴⁸

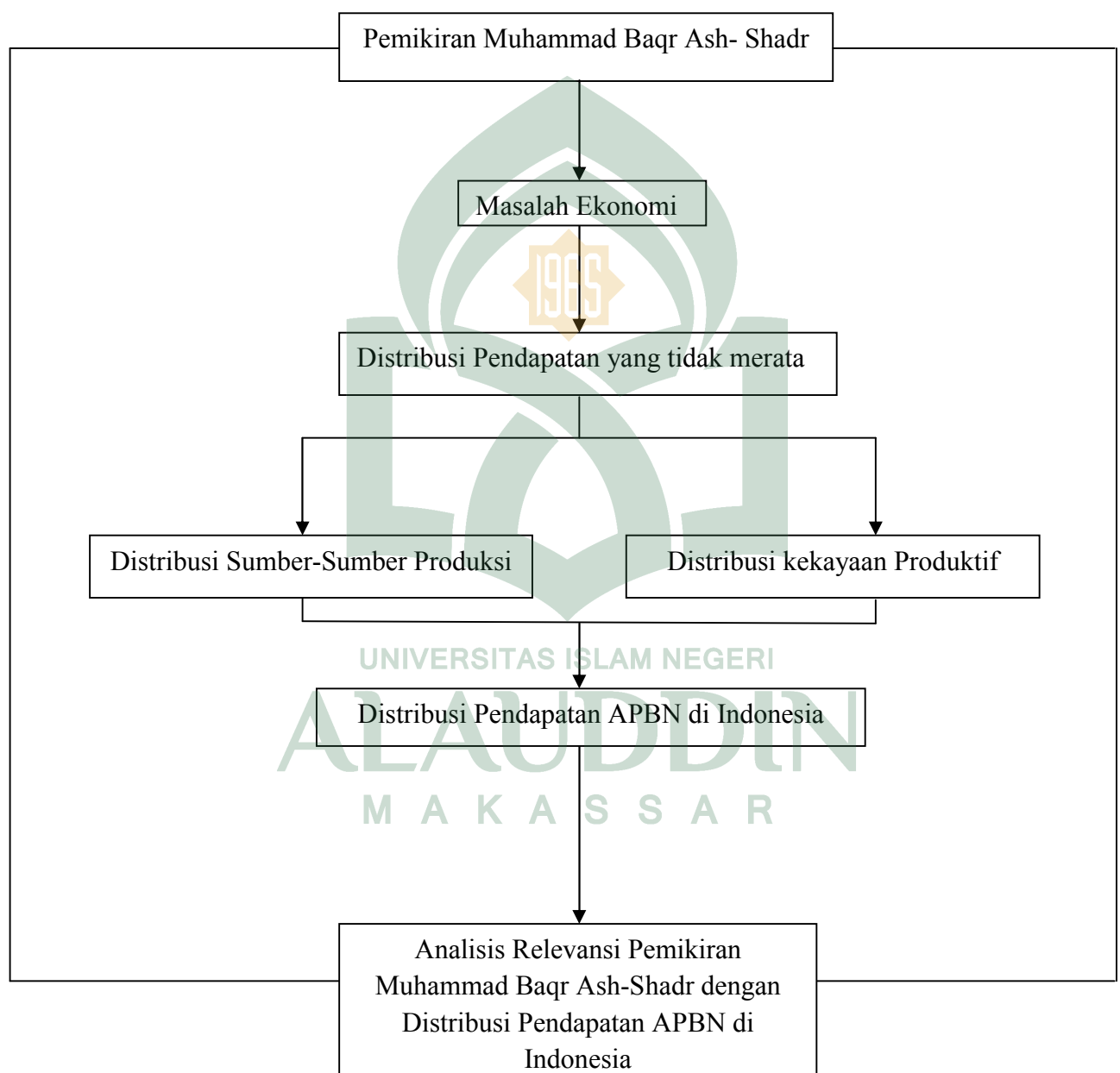
Pada tatanan praktis, negara harus hadir dalam mengintervensi hukum guna menjamin adaptasi hukumnya yang terkait dengan individu. Misalnya, larangan transaksi bisnis dengan bunga, atau penguasaan atas sebidang tanah tanpa mereklamasinya dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Hal demikian pula, negara mempunyai kewajiban menjalankan sendiri aturan yang terkait langsung dengan pengimplementasian prinsip jaminan sosial dan keseimbangan sosial di dalam masyarakat yang sesuai dengan arahan Islam.⁴⁹

⁴⁸Aziz, "An Islamic Perspective of Political Economy: The Views of (late) Muhammad Baqir Al-Sadr", *Jurnal Ahlul Bayt World Assembly*, Vol. 10 No. 1, 2018, h. 10.

⁴⁹M. Baqir Ash-Shadr, *Ringkasan Iqtishaduna, Ekonomi kita Mahzab & Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: RausyanFikr Institute, 2012), h. 126-127.

D. *Kerangka Konseptual*

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Biasanya kerangka penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah untuk memperlihatkan hubungan antar variabel dalam proses analisisnya.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Distribusi pendapatan negara merupakan salah satu aktivitas yang sangat penting dalam perekonomian khususnya dalam pembangunan sebuah negara. Hal ini dikarenakan, distribusi pendapatan merupakan masalah yang sangat esensial dalam kehidupan masyarakat. Sebab, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sangat bergantung pada proses pembagian kekayaan atau pendapatan yang adil dan merata. Mekanisme distribusi kekayaan atau pendapatan yang tidak berjalan dengan baik, akan menimbulkan penyimpangan distribusi yang akumulatif yang mengakibatkan yang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin. sebagai salah satu bidang kajian terpenting dalam teori ekonomi mikro dan makro Islam dan konvensional sampai saat ini.

Salah satu pemikir ekonomi Islam kontemporer yang sangat *concern* dengan masalah distribusi pendapatan ialah Muhammad Baqr Ash-shadr dalam pemikirannya, ia mengemukakan bahwa masalah ekonomi muncul, disebabkan karena adanya distribusi pendapatan yang tidak merata dan tidak adil diantara masyarakat yaitu distribusi sumber-sumber produksi dan distribusi kekayaan produktif, yang mengakibatkan terjadi konsentrasi kekayaan yang hanya dinikmati oleh segelintir orang kaya saja, sehingga orang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang begitu melimpah. Karena itu, kebijakan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat dengan mendistribusikan kekayaan atau pendapatan negara secara adil dan merata untuk seluruh masyarakat melalui fungsi distribusi anggaran baik terkait dengan pemasukan maupun pengeluarannya yang dimuat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB III

DISTRIBUSI APBN INDONESIA

A. *Distribusi*

1. Pengertian Distribusi

Distribusi dalam kamus bahasa Indonesia, merupakan pembagian, pengiriman, barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat,¹ pembagian dimaksudkan bila keadaan barang tidak banyak jumlahnya, itu diadakan distribusi agar semua orang memperolehnya. Sedangkan dalam kamus istilah ekonomi distribusi diartikan sebagai pembagian hasil penduduk kepada individu-individu atau pembagian kekayaan nasional kepada setiap warga masyarakat, dan pembagian pemasukan penduduk untuk setiap orang dari faktor-faktor produksi.² Namun dalam bahasa arab disebut sebagai (*daulah*) yang berarti perpindahan sesuatu dari satu tempat lain atau sebutan untuk benda yang diputar oleh suatu kaum. Benda tersebut juga berarti harta yang terus diputar (didistribusikan). Adapun menurut istilah, distribusi mengandung arti pembagian atau penyaluran sesuatu kepada orang atau pihak lain.

Berkaitan dengan pengertian distribusi yang telah diuraikan sebelumnya, memberikan gambaran bahwa distribusi merupakan penyaluran dan pembagian barang-barang atau harta kekayaan dari individu satu kepada orang lain. Barang-barang atau harta benda yang disalurkan (didistribusikan) atau yang dapat dimanfaatkan manusia ini adalah hasil dari faktor-faktor produksi. oleh sebab itu produksi dan distribusi merupakan suatu proses atau sistem ekonomi. yang mana

¹Dessy Anwar, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), Cet. Ke-1, h. 125.

²Thahir Abdul Muslim Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, (Bandung : PT AL-Ma'rif, 1985). Cet ke 1, h. 73.

keduanya saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Misalnya seseorang itu, dapat menghasilkan barang atau benda, maka tidak mungkin benda itu hanya dimanfaatkan atau ia simpan untuk kepentingannya sendiri tanpa ia menyalurkan atau membagikan manfaat benda atau jasa dari apa saja yang dihasilkannya itu kepada orang lain.

2. Faktor-faktor Distribusi

Manusia pada umumnya secara kodrati dalam kehidupannya menuntut berbagai macam kebutuhan untuk *survive*, baik berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Guna memenuhi kebutuhan hidupnya mereka bekerja memproduksi bahan-bahan yang telah disediakan oleh alam, hasil produksinya dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Produksi atau barang dan jasa yang ditunjukkan melayani kebutuhan masyarakat memerlukan pemasaran hasil-hasilnya, agar dinikmati oleh para konsumen. Sesuai kodrat kejadian manusia sebagai makhluk sosial, manusia harus hidup bermasyarakat. Juga dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidupnya manusia tidak biasa bekerja sendiri, tetapi harus bersama-sama orang lain. Agar manusia bermasyarakat dapat tentram, perlu adanya sistem pembagian kekayaan.³

Masalah-masalah kebutuhan, produksi, konsumsi, pemasaran dan distribusi merupakan persoalan-persoalan kunci ekonomi, sehingga satu elemen dengan yang lainnya saling berhubungan erat. Kenyataan itu dapat dicermati dari dua hal sebagai berikut:

Pertama, bahwa setiap distribusi itu, mendorong semangat berproduksi, dan buktinya pada saat ini dalam kenyataannya ada tertimbun kekayaan yang cukup banyak. Dan dari segi teoritis manakah cara lain yang lebih baik untuk memberi semangat kepada daya kerja seseorang individu dalam berproduksi. Satu

³Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman (Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi)*, (Bandung : Mizan, 1993) Cet ke 1, h. 177.

hal yang aksiomatis bahwa dalam suatu masyarakat yang terkaya sekalipun, apabila kekayaan itu dibagi sama rata diantara semua warganya, maka tentulah bagian untuk setiap orang kaya sedikit sekali. Maka dari itu, tidaklah bijaksana bila dihentikan sistem yang mengajak kepada produksi yang banyak.

Kedua, bahwa sistem distribusi itu tidak memerangi hak manusia untuk menikmati kemerdekaan pribadi. Hal ini karena distribusi yang berdasarkan persaingan bebas dan hukum persediaan dan permintaan, tidak memerlukan kepada suatu kebebasan untuk melakukan pembagian. Karena orang bekerja itu memang tidak perlu diminta membuat suatu sistem distribusi.

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia tidak mungkin dapat menyelenggarakan sendiri tanpa melibatkan orang lain, sesuai hakikatnya sebagai makhluk sosial. Dengan demikian pendapatan masyarakat terjadi dan kerjasama setiap individu. Sudah seharusnya setiap orang telah memberikan jasanya dalam mewujudkan pendapatan masyarakat itu memperoleh haknya yang layak. Dari sinilah masalah timbul distribusi pendapatan masyarakat.

Kendatipun demikian, dari dulu sampai sekarang masih berlangsung kontroversi yang luas dan sengit tentang pokok persoalan distribusi pendapatan nasional antara berbagai golongan rakyat disetiap negara demokratis di dunia. Hal ini disebabkan kesejahteraan ekonomi rakyat sangat tergantung pada distribusi pendapatan nasional. Misalnya kesenjangan ekonomi.

Kesenjangan yang lebar di tengah-tengah masyarakat harus segera diatasi dengan menerapkan keseimbangan ekonomi melalui mekanisme distribusi. Negara akan bertanggung jawab akan jalannya sistem ekonomi ditengah-tengah masyarakat. Negara harus menjamin kebutuhan pokok setiap rakyatnya, mendistribusikan harta orang kaya yang menjadi hak fakir miskin, serta

mengawasi pemanfaatan hak milik umum maupun negara. Apabila masyarakat mengalami kesenjangan yang lebar antar pribadi dalam memenuhi kebutuhannya, atau di dalam masyarakat tersebut terjadi kesenjangan karena mengabaikan hukum-hukum Islam, serta meremehkan penerapan hukum-hukum Islam, maka negara harus memecahkannya dengan cara mewujudkan keseimbangan di masyarakat, dengan cara memberikan harta negara kepada orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya.

3. *Distribusi dalam Islam*

Distribusi merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia yang sangat penting, di samping produksi dan konsumsi. Dorongan Islam terhadap sektor distribusi telah dijelaskan secara eksplisit di dalam al-qur'an. Ajaran Islam mengenai distribusi menuntut manusia agar mendistribusikan atau menyebarkan harta kekayaan yang mereka miliki agar tidak menumpuk hanya pada segolongan masyarakat yang kaya saja. Pendistribusian harta kekayaan yang tidak adil dan merata di masyarakat akan menimbulkan orang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin.

Menurut Afzularrahman, distribusi merupakan suatu cara di mana kekayaan disalurkan atau dibagikan ke beberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu-individu, masyarakat maupun negara. Dengan singkat Idri menyatakan, distribusi merupakan suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai.⁴

Anas Zarqa juga mengungkapkan bahwa distribusi bermakna transfer (*mentasharuf-kan*) pendapatan kekayaan antar individu dengan cara pertukaran (melalui pasar) atau dengan cara lain atau, seperti warisan, shadaqah, wakaf, dan

⁴Idri, *Hadis Ekonomi*, "Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi", (Jakarta : Kencana, 2015), h. 128.

zakat.⁵ Sedangkan Dr. Jaribah merupakan makna distribusi jauh lebih luas lagi, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Yang mengisyaratkan bahwa Islam tidak melarang adanya kepemilikan umum, dan kepemilikan individu, serta meletakkan kaidah-kaidah untuk mendapatkan dan mempergunakan bagi masing-masing diantara keduanya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa distribusi mempunyai makna suatu proses penyaluran pendapatan kekayaan dari satu individu ke individu yang lain baik melalui perdagangan maupun melalui instrumen zakat, waqaf, infaq, shadaqah, dan warisan. Dalam perspektif agama Islam distribusi memiliki makna cukup luas, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber-sumber kekayaan.

Dalam Al-qur'an distribusi mempunyai makna *ad-dulah* berasal dari bahasa arab yang lafaznya sinonim atau sama. Makna kata *ad dawlah* berakar dari kata huruf *dal- waw-lam* yang mazdharnya adalah *dawlah*. *Ad daulah* merupakan suatu Ism (kata benda) yang zatnya terus berputar.⁶ Sebagaimana dalam (Q.S. Al-Hasyr: 59/7) yang di dalamnya terdapat makna kata *ad daulah* adalah sebagai berikut :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan:

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang

⁵ Abdul Aziz, “Etika Bisnis Perspektif ekonomi Islam Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha”, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 177.

⁶ Raqib al-Asfahaniy, *Mu'jam Mufradat al-Fazh al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), h.176.

miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (Q.S. Al-Hasyr: 59/7).⁷

Makna kata *dulah* dalam surah al-Hasyr ayat 7 menunjukkan bahwa makna distribusi merupakan adanya suatu proses pengelolaan harta kekayaan, kemudian harta kekayaan tersebut di bagi-bagikan kepada seluruh anggota masyarakat dan harta kekayaan itu tidak boleh menjadi komoditas yang peredarannya terbatas diantara orang-orang kaya saja.⁸ Kata *daulatan baina agniya* diartikan sebagai *milkan mutadawalan bainahum khassah* (harta yang tersirkulasi khusus dikalangan mereka, maksudnya orang-orang kaya).⁹ *Al-Daulah* merupakan harta yang berputar di kalangan manusia dan beredar dari tangan ke tangan.¹⁰

Sedangkan menurut Prof. Dr. wahbah Zuhaili dalam kitab tafsir Al-Munir mendefenisikan kata *ad-daulah* dengan *mutadaawilan* yang artinya berputar dan beredar. Beliau membedakan kata *ad-duulah* dan *ad-daulah*, *ad-duulah* dengan di baca fathah, artinya keadaan yang berputar silih berganti (perputaran roda kehidupan).¹¹

Dari beberapa definisi diatas tentu dapat kita ambil kesimpulan bahwa definisi distribusi dalam Islam mempunyai makna yang begitu luas dibandingkan definisi konvensional atau kapitalisme. Menurut Persepektif Islam, makna

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Furqon*, (Jakarta : PT Citra Mulia Agung, 2015), h. 546.

⁸Afzalurrahman, Muhammad Sebagai Seorang Pedagang, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997), h. 286.

⁹Hasanain Muhammad Machluf, *Kalimat al-Qur'an, Tafsir Wa bayan*, (Cairo: Dar al-Fikr, 1956), h. 204.

¹⁰Muhammad Husain Thabathaba'i, *Tafsir Mizan*. Juz 17, (Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1342), h. 334.

¹¹Prof. Dr. Wahbah Az –Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, (Jakarta: Gema Insani, 2014), Jilid 14, h. 453.

distribusi mencakup atau meliputi aspek filosofis dan normatif, sedangkan makna distribusi dalam pengertian konvensional hanya bersifat normatif praktis.

B. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan, baik tunai maupun tidak tunai yang merupakan hasil dari penjualan barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu. selain itu, pendapatan ialah penerimaan dana sebagai hasil dari suatu investasi.

Dalam teori ekonomi makro, pendapatan diartikan sebagai keseluruhan penghasilan atau penerimaan yang diperoleh para pemilik faktor produksi dalam suatu masyarakat selama kurun waktu tertentu. pendapatan adalah penghasilan yang diterima oleh seseorang dari usaha kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang dapat berupa barang dan jasa.

Reksopriyatno mendefinisikan pendapatan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu.¹² Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam suatu periode tertentu.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan.

2. Sumber- Sumber Pendapatan

Ada tiga sumber penerimaan pendapatan yaitu :

a. Pendapatan dari gaji atau upah

Pendapatan dari gaji atau upah merupakan balas jasa dari kesediaan tenaga kerja. Besar gaji dan upah seseorang sangat tergantung pada

¹²Reksopriyatno, *Sistem Ekonomi Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta : Bina Grafika, 2004), h. 79.

produktivitasnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas, diantaranya sebagai berikut:

- 1.) Keahlian (*Skill*) adalah kemampuan teknis yang dimiliki seseorang untuk mampu menangani pekerjaan yang dipercayakan.
- 2.) Mutu modal manusia (*human capital*) adalah kapasitas pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang dimiliki seseorang, baik karena bakat bawaan (*Inborn*) maupun hasil pendidikan dan latihan.
- 3.) Kondisi kerja (*working Conditions*) adalah lingkungan dimana seseorang bekerja.

b. Pendapatan dari aset Produktif

Asset produktif merupakan asset yang memberikan pemasukan atas balas jasa penggunaannya. Ada dua kelompok aset produktif yaitu : *Pertama*, asset finansial (*financial Asset*), seperti deposito, yang menghasilkan pendapatan bunga saham yang menghasilkan dividen dan keuntungan atas modal (*Capital again*) bila diperjual belikan. *Kedua*, asset bukan finansial (real asset) seperti rumah yang memberikan penghasilan sewa.

c. Pendapatan dari pemerintah

Pendapatan dari pemerintah atau penerima transfer adalah pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa atau input yang diberikan. Di negara-negara yang telah maju, penerimaan transfer diberikan misalnya dalam bentuk tunjangan penghasilan bagi para penganggur (*unemployment Compensation*), jaminan sosial bagi para orang-orang miskin dan berpendapatan rendah.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan

Ada beberapa faktor- faktor yang mempengaruhi pendapatan antara lain :

- a. Kesempatan kerja yang tersedia

Semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia semakin berarti semakin banyak penghasilan yang diperoleh dari hasil kerja tersebut.

b. Kecakapan dan keahlian

Dengan bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap penghasilan.

c. Motivasi dan dorongan

Motivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah penghasilan, semakin besar dorongan seseorang untuk melakukan pekerjaan, semakin besar pula penghasilan yang diperoleh

d. Keuletan kerja

Pengertian keuletan dapat disamakan dengan ketekunan, keberanian menghadapi segala macam tantangan. Bila saat menghadapi kegagalan maka kegagalan tersebut dijadikan sebagai bekal untuk meneliti ke arah kesuksesan dan keberhasilan.

e. Banyak sedikitnya modal yang digunakan

Besar kecilnya usaha yang dilakukan seseorang sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya modal yang penggunaan. Suatu usaha yang besar akan dapat memberikan peluang yang besar pula terhadap pendapatan yang akan diperoleh.¹³

Menurut Suparmoko, ada dua faktor yang mempengaruhi pendapatan individu yaitu,

a. Besarnya pendapatan yang diterima oleh penduduk yang bersangkutan (balas jasa faktor produksi).

¹³Ratna Sukmawati, *Ilmu Pengetahuan Sosial*,(Jakarta: Galaxy Puspa Mega, 2008), h. 117.

- b. Balas jasa kekayaan yang dimilikinya. Kekayaan ini bisa berasal dari warisan atau tabungan sendiri.

Kedua sumber penghasilan ini akan sangat menentukan besar kecilnya pendapatan seseorang anggota masyarakat dan tentu dengan sendirinya berpengaruh pula terhadap jenis maupun jumlah barang publik sebaiknya disesuaikan kebutuhan masyarakat agar penyediaan tersebut efektif. Keinginan masyarakat beragam sesuai dengan pendapatannya. Disinilah, kebijakan fiskal harus dapat mengurangi perbedaan-perbedaan pendapatan antarindividu dalam masyarakat tersebut atau lebih dikenal dengan fungsi distribusi. Salah satu implementasi fungsi ini adalah pengeluaran pemerintah dalam upaya menurunkan ketimpangan pendapatan antar individu, daerah, dan pulau. Sebenarnya tujuan akhir dari fungsi ini adalah penurunan jumlah kemiskinan.¹⁴

C. Distribusi Pendapatan APBN di Indonesia

1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang setiap tahunnya ditetapkan dengan undang-undang, dan di dalamnya terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.¹⁵

Secara umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sangat penting untuk melaksanakan dan menjalankan fungsi dan tugas pemerintah yang menjadi bagian pengeluaran pemerintah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan amanah Pancasila dan UUD 1945. Pendapatan atau penerimaan negara yang mencakup penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa (output produksi) yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, dan sumber-sumber penerimaan

¹⁴Ferry Prasetya, "Rekonstruksi Sistem Fiskal dalam Bingkai Konstitusi", *Jurnal of Indonesian Applied Economics*, Vol. 5 No. 2, 2011, h. 151.

¹⁵Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 288.

lainnya,¹⁶ merupakan suatu hal yang harus mempunyai peran serta dampak yang positif bagi kesejahteraan masyarakat. karena itu fungsi distribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjadi bagian yang penting dalam merefleksikan setiap pendapatan dan pengeluaran negara setiap tahunnya.

Konsep Distribusi Pendapatan APBN di Indonesia pada dasarnya merujuk kepada ideologi dasar konstitusi UUD 1945. Kehidupan dasar ekonomi nasional Indonesia secara spesifik kebangsaan dan doktrin kerakyatan terdapat pada pasal 33, pasal 34, dan pasal 27 UUD 1945. Pasal-pasal ini menjadi rujukan pendistribusian pendapatan yang merupakan benteng nasionalisme ekonomi dan benteng pengutamaan kepentingan kehidupan seluruh rakyat Indonesia.

Pendistribusian pendapatan nasional perlu campur tangan pemerintah agar mereka yang berpenghasilan rendah ikut memperoleh bagian pendapatan nasional. sesuai dengan konstitusi UUD 1945, sudah menjadi kewajiban negara untuk mendukung terwujudnya distribusi pendapatan yang tepat dan merata, pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara lebih realistis, kredibel, berkualitas dan berkelanjutan, sehingga ke depan dapat menjadi instrumen dalam mengatasi berbagai permasalahan bangsa.¹⁷

2. Sumber Penerimaan atau pendapatan negara (*Government Revenue*)

Penerimaan atau pendapatan negara (*government revenue*) merupakan semua penerimaan kas umum (kas pemerintah pusat) atau kas daerah (kas pemerintahan daerah) dari berbagai sumber yang sah, menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat atau daerah.¹⁸

¹⁶Aan Jaelani, "Islamic Public Finances: Reflections on the APBN and the Budget Politics in Indonesia: MPRA Paper", (Cirebon: Nurjati Press, 2014), h. 26-27.

¹⁷Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 216.

¹⁸Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 222.

Dalam makna yang luas, penerimaan atau pendapatan negara merupakan seluruh merupakan seluruh penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, percetakan uang, pinjaman pemerintah, menjalankan berbagai pungutan dari masyarakat yang di dasarkan pada Undang-undang seperti pajak dan lain sebagainya.

Adapun sumber-sumber penerimaan atau pendapatan negara dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Sumber Penerimaan Negara dari pengumpulan pajak

Pajak merupakan suatu pungutan yang dilakukan pemerintah (pusat/daerah) terhadap wajib pajak tertentu berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa harus memberikan imbalan langsung. Sifat pungutan merupakan pengalihan sumber-sumber dari sektor swasta (masyarakat) ke sektor pemerintah untuk membiayai tugasnya dalam mencapai tujuan ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Misalnya :

- 1) Pajak pusat: Pajak Penghasilan (Pph), Pajak pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang mewah (PPN, PPn-BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bea Materai, Bea Masuk, Cukai, dan Pajak Ekspor.
- 2) Pajak Daerah: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Hotel dan Restoran (PHR), Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Bahan Bakar.¹⁹

b. Sumber Penerimaan Negara Dari Retribusi

¹⁹Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 223.

Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat/daerah) berdasarkan Undang-undang (regulasi tertentu) kepada masyarakat dengan memberikan imbalan jasa secara langsung. Dalam hal ini, sifat pungutan tersebut dikaitkan dengan pemberian layanan tertentu yang diberikan pemerintah (pusat/daerah) sebagai imbalan langsung kepada masyarakat yang bersangkutan. Misalnya, pelayanan medis di rumah sakit milik pemerintah pusat/daerah, pelayanan parkir yang diselenggarakan pemerintah, pembayaran sekolah/kuliah bagi pelajar mahasiswa kurang mampu dan lain-lain.

- c. Sumber penerimaan Negara dari Bagian Keuntungan Perusahaan Negara
Sumber Penerimaan Negara dari bagian keuntungan Perusahaan Negara merupakan penerimaan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah. Karena itu pemerintah (pusat/daerah) berhak menerima bagian keuntungan dari keuntungan yang diperoleh perusahaan Negara (BUMN/BUMD) karena adanya penyertaan modal yang ditanamkan oleh pemerintah di dalam perusahaan tersebut.²⁰
- d. Sumber Penerimaan Negara yang berasal dari Denda dan Sita
Dalam memungut denda dan sita, pemerintah berhak membebaskan kepada masyarakat tertentu apabila dalam masyarakat (individu/kelompok/organisasi) tersebut diketahui melakukan suatu pelanggaran yang ketentuannya telah diatur oleh pemerintah. Misalnya, denda pelanggaran lalu lintas, denda pelanggaran ketentuan perpajakan, dan penyitaan barang hasil penyelundupan.
- e. Sumber penerimaan Negara dari Percetakan Uang

²⁰Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 224.

Pemerintah merupakan salah satu pemegang otoritas kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, karena itu sifat kekuasaan dan fungsi pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai hak untuk mencetak uang. Pencetakan uang ini biasanya dilakukan pemerintah untuk menutupi defisit anggaran, hal ini dilakukan bilamana cara lain untuk menutupi defisit anggaran itu tidak dapat dilakukan.

f. Sumber penerimaan Negara dari Pinjaman

Pinjaman yaitu salah satu alternatif sumber penerimaan bagi suatu negara yang harus dibayar kembali dalam jumlah yang lebih besar (pokok pinjaman ditambah bunga). Pinjaman yang menjadi penerimaan negara tersebut, di peroleh dari pinjaman dari dalam negeri seperti bank sentral atau masyarakat (individu atau perusahaan) dan luar negeri yang diperoleh dari negara-negara sahabat atau institusi-institusi keuangan Internasional seperti Bank Dunia, *Asian Development Bank*, dan lain-lain lembaga keuangan.²¹

g. Sumber Penerimaan Negara dari Sumbangan, Hadiah, dan Hibah.

Sumber penerimaan Negara dari sumbangan, Hadiah, dan Hibah. Pada dasarnya penerimaan tersebut, berasal dari masyarakat perorangan (individu), kelompok, organisasi dan perusahaan di dalam negeri maupun negara sahabat dan masyarakat internasional.

h. Sumber Penerimaan Negara dari Penyelenggaraan Undian Berhadiah

Penyelenggaraan undian berhadiah dilakukan oleh pemerintah (pusat/daerah) dengan menunjuk lembaga pelaksana tertentu sehingga penerimaan tersebut diperkirakan dapat diterima secara rutin. Jumlah yang

²¹Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 225.

diterima oleh pemerintah merupakan selisih antara penerimaan setelah dikurangi biaya operasi besarnya hadiah yang dibagikan.

3. Sumber Pengeluaran Negara (*Government Expenditure*)

Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara dalam rangka mencapai taraf kehidupan masyarakat yang sejahtera, serta untuk menjaga kedaulatan negara diperlukan suatu anggaran negara dan belanja negara yang kemudian di distribusikan kepada semua masyarakat. Berdasarkan pengeluaran Negara, Suparmoko menjelaskan pengeluaran negara dapat ditinjau dari berbagai segi seperti berikut.²²

- a. Pengeluaran yang merupakan investasi, yaitu menambah kekuasaan dan ketahanan ekonomi pada masa yang akan datang.
- b. Pengeluaran yang secara langsung dapat memberikan kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Pengeluaran yang merupakan penghematan untuk pengeluaran negara yang akan datang.
- d. Pengeluaran untuk menyediakan kesempatan kerja yang lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas.

Dari tinjauannya tersebut, jenis pengeluaran dikelompokkan berdasarkan macam-macamnya seperti berikut.

- a. Pengeluaran yang sebagian atau seluruhnya bersifat *self liquidating*, yaitu pengeluaran yang mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima barang-barang/jasa-jasa yang diberikan pemerintah. Misalnya, pengeluaran untuk jasa-jasa perusahaan negara atau proyek-proyek produktif.

²²Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 209.

- b. Pengeluaran reproduktif, yaitu pengeluaran yang mewujudkan keuntungan-keuntungan secara ekonomis bagi masyarakat sehingga mampu meningkatkan penghasilan masyarakat, yang kemudian dengan memfungsikan pajak pada akhirnya akan dapat menaikkan penerimaan negara.
- c. Pengeluaran yang tidak *Self Liquidating*, dan tidak produktif, yang pengeluaran yang dapat langsung menghibur atau kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat, antara lain bidang rekreasi, pendirian monumen, objek turisme, dan sebagainya. Pengadaan objek-objek tadi dapat pula menaikkan pendapatan nasional sebagai akibat dari jasa objek tersebut.
- d. Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan, misalnya biaya untuk pembiayaan pertahanan/perang, meskipun pada saat pengeluarannya penghasilan perseorangan yang menerimanya akan naik.
- e. Pengeluaran yang merupakan penghematan untuk masa yang akan datang, misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim. Jika hal ini tidak dilakukan lebih dini, kebutuhan pemeliharaan (pendidikan dan kesejahteraan) anak-anak yatim itu akan lebih besar pada saat tua.²³

4. ***Distribusi Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.***

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan salah satu instrumen pengelolaan negara yang memuat rincian penerimaan dan pengeluaran negara yang diterima dari hasil penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, percetakan uang, pinjaman pemerintah, menjalankan berbagai pungutan dari masyarakat yang di dasarkan pada Undang-undang seperti pajak dan lain sebagainya.

²³Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 210

Dalam ideologi dasar dan konstitusi UUD 1945 terdapat amanat yang harus dijalankan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menjamin hak warga negara dengan menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan umum bagi semua masyarakat. Landasan hukum Konstitusi dalam UUD 1945 tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pasal 27 ayat 2 yang mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.²⁴
2. pasal 28 D ayat 1, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
3. Pasal 28 H ayat 3, bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
4. Pasal 28 I ayat 4, bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
5. Pasal 31
 - a) Ayat 1, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
 - b) Ayat 2, bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
 - c) Ayat 3, bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

²⁴Yohandarwati, *Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial*, Direktorat Kependudukan, Kesejahteraan Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan (BAPPENAS: 2002), h. 4-5.

- d) Ayat 4, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- e) Ayat 5, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.²⁵

6. Pasal 33

- a) Ayat 1, Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- b) Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,
- c) Ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- d) Ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

7. Pasal 34

- a) Ayat 1, bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- b) Ayat 2, bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

²⁵Yohandarwati, *Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial*, Direktorat Kependudukan, Kesejahteraan Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan (BAPPENAS: 2002), h. 23.

- c) Ayat 3, bahwa negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak.²⁶

Berdasarkan landasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diuraikan diatas, dapat dipahami bahwa negara dalam hal ini pemerintah sebagai *waliyyul amr*' (kepala negara) dalam pengelolaan kekayaan negara dan pendistribusiannya harus memperhatikan nilai dan norma keadilan sosial bagi seluruh masyarakat keseluruhan, kemakmuran serta kesejahteraan harus dirasakan oleh semua masyarakat secara keseluruhan bukan hanya dirasakan oleh individu atau perorangan. Karena itu, negara dalam hal ini pemerintah sebagai *waliyyul amr*' atau kepala negara memiliki domain yang sangat penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial di dalam masyarakat melalui distribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pada umumnya semua negara di dunia mempunyai tujuan yang sama yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menciptakan kesejahteraan umum dalam masyarakat. Hal ini tentunya setiap negara memiliki sumber daya alam maupun kekayaan atau pendapatan negara dalam menjalankan fungsi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum di masyarakat. Tujuan dalam mewujudkan kesejahteraan umum di dalam masyarakat tersebut dapat dicapai dengan mengikutsertakan masyarakat dalam upaya mewujudkannya. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, pengeluaran negara/pemerintah (*government Expenditure*). Hal ini dapat dilihat, berdasarkan fungsi distribusi anggaran sebagai berikut:

1) Pelayanan umum

Belanja pelayanan umum, merupakan belanja yang termasuk dalam kategori antara lain belanja operasi untuk organisasi eksekutif dan

²⁶Sri Edi Swasono, *Membangun Sistem Ekonomi Nasional: Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: UI Press, 1987), h. 140.

legislatif, belanja untuk jasa-jasa umum, belanja riset dasar, belanja transaksi utang, dan belanja administrasi transfer antar-unit pemerintah.²⁷

2) Pertahanan

Belanja pertahanan, belanja dalam kategori ini antara lain belanja pertahanan militer dan sipil, dan bantuan militer untuk asing, riset pertahanan, dan sebagainya.

3) Ketertiban dan keamanan

Belanja ketertiban dan keamanan, belanja dalam kategori antara lain belanja jasa kepolisian, jasa pemadam kebakaran, jasa pengadilan, jasa rumah tahanan, dan penjara serta riset untuk perlindungan publik.

4) Lingkungan hidup

Belanja lingkungan hidup merupakan belanja yang termasuk diantaranya belanja pengolahan limbah dan polusi, proteksi keragaman hewani maupun tata kota.

5) Perumahan dan fasilitas Umum

Belanja dalam kategori ini diantaranya pengembangan perumahan dan pemukiman, sistem penyediaan air bersih, belanja penerangan jalan, dan pekerjaan umum lainnya.

6) Kesehatan

Belanja kesehatan meliputi, perlengkapan dan peralatan kesehatan, jasa kepada pasien, jasa rumah sakit umum, dan risetnya.

7) Parawisata, Budaya, dan Agama

Belanja pariwisata, Budaya, dan Agama meliputi belanja jasa olahraga dan rekreasi, belanja jasa kebudayaan, jasa penyiaran, jasa urusan keagamaan, dan komunitas, dan lain-lain.

²⁷Nurul Huda, Dkk., *Keuangan Publik Islami : Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 15.

8) Pendidikan

Belanja pendidikan, mencakup belanja pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, termasuk belanja pendukung lainnya.

9) Perlindungan Sosial²⁸

Belanja yang termasuk perlindungan sosial mencakup, belanja perlindungan terhadap masyarakat lanjut usia (manula), belanja perlindungan anak dan keluarga, belanja untuk mengatasi pengangguran, dan belanja negara lainnya.

Berdasarkan sumber pengeluaran negara yang telah diuraikan diatas, bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat umum, maka negara mempunyai kewajiban untuk menjalankan fungsi distribusi anggaran pendapatan dan belanja negara dengan mewujudkan pemenuhan kebutuhan bagi semua masyarakat dengan cara mendistribusikan kekayaan atau pendapatan negara secara adil, tepat, dan merata di seluruh lapisan masyarakat. Adapun beberapa alasan mengapa rakyat atau masyarakat berhak menerima distribusi anggaran pendapatan yang rasional dan proporsional dari APBN, yaitu :

- a. Rakyat merupakan penyumbang utama sumber penerimaan dalam APBN melalui pajak dan retribusi, bahkan sumber penerimaan yang berasal dari utang pun, kebutuhan rakyat jumlah yang dipresentasikan pada pihak ketiga.
- b. Sesuai hakikat dan fungsi anggaran, rakyat merupakan tujuan utama yang akan disejahterakan.
- c. Amanah konstitusi Pasal 23 UUD, dengan jelas dan tegas dinyatakan bahwa rakyat berhak untuk ikut dalam penyusunan dan pengambilan

²⁸Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 218.

keputusan anggaran. Hal ini diperkuat dengan Undang-undang Keuangan Negara dan Kepmendagri.²⁹



²⁹Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 254.

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD BAQR ASH-SHADR TENTANG DISTRIBUSI PENDAPATAN NEGARA

A. *Distribusi pendapatan Negara Menurut Muhammad Baqr Ash-shadr*

Dalam menganalisa pemikiran Muhammad Baqr Ash-shadr tentang konsep distribusi kekayaan atau pendapatan Negara, terlebih dahulu peneliti akan membahas mengenai konsep distribusi secara umum. Muhammad Baqr Ash-shadr dalam *Iqtishaduna* menjelaskan bahwa:

“Pusat dari perspektif legal merupakan fakta bahwa distribusi diidentifikasi sebagai wilayah tempat masalah ekonomi masyarakat terjadi.”¹

Perangkat-perangkat dari masalah distribusi tersebut menjadi bagian yang di diskusikan Baqr Ash-shadr ada dua konsep yang menopang yaitu Perangkat-perangkat dari distribusi dalam Islam dinyatakan dalam dua peranti esensial yaitu kerja dan kebutuhan.² Kerja dalam perspektif Islam merupakan alasan bagi kepemilikan pekerja atas hasil dari pekerjaannya atau sebuah aktivitas dimana manusia dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya sekaligus menumbuhkan kembangkan eksistensinya sebagai seorang manusia. Sedangkan Kebutuhan merupakan keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu demi untuk kelangsungan hidupnya

Menurut analisa Penulis, bahwa hal ini menunjukkan bahwa kerja dan kebutuhan merupakan suatu elemen yang tidak bisa dipisahkan, sebab kerja merupakan alat distribusi paling primer untuk mencapai kebutuhan hak manusia

¹Chibli, Mallat, *Menyegarkan Islam. Alih Bahasa Santi Indra Astuti*, (Cet I, Bandung: Mizan, 2001), h. 180.

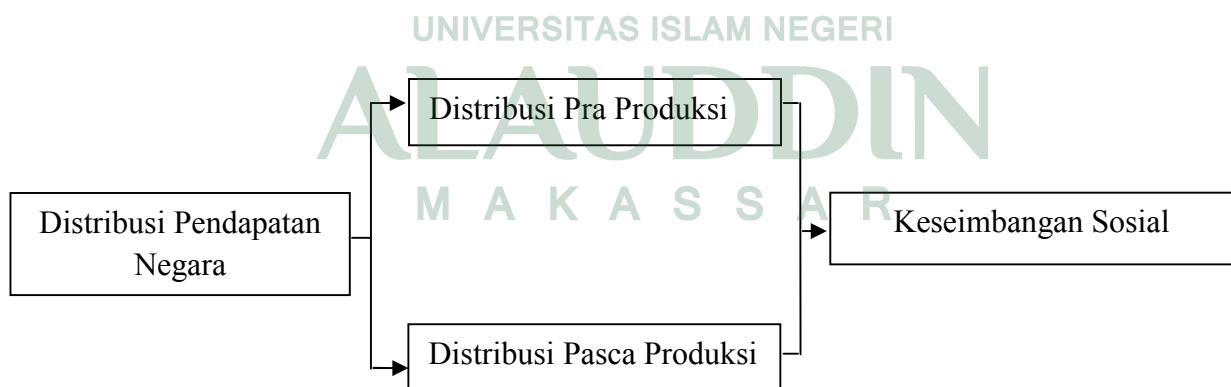
²Ubay, “Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Baqir Sadr” *Jurnal Hunafa* Vol. 2 No.3, 2005, h. 225-242.

yang bersifat esensial dalam kehidupan. Muhammad Baqr Ash-shadr dalam buku Iqtishaduna mengatakan bahwa:

“Manusia memiliki berbagai kebutuhan dan keinginan yang mesti dipenuhi sedemikian rupa, hingga mampu menjaga dan mengembangkan kemanusiaannya. Manusia tetaplah manusia dengan segala kebutuhan dan keinginannya, tak peduli apakah ia menggarap tanah dengan tangannya atau memanfaatkan tenaga listrik atau uap untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya tersebut.”³

Menurut analisa penulis, bahwa pada dasarnya setiap manusia memiliki berbagai macam kebutuhan, keinginan, dan hasrat yang harus dipenuhi, karena itu kerja merupakan sebuah usaha untuk mendapatkan hasil dari pekerjaannya, sehingga hasil kerja atau output produksi yang dihasilkan dari kerja dalam bentuk upah (gaji) atau profit yang dinilai dalam uang tersebut, dapat membantu menumbuhkembangkan eksistensinya sebagai seorang manusia. Karena itu, untuk menjamin manusia tersebut dapat memenuhi segenap kebutuhannya dan keinginannya, Muhammad BaqrAsh-Shadr membagi distribusi kekayaan atau pendapatan negara menjadi dua tingkatan :

“Pertama adalah distribusi sumber-sumber produksi (*Distribution Pra-Production*), sedangkan yang kedua adalah distribusi kekayaan produktif (*Distribution Post-Production*).”⁴



³Muhammad Baqir Ash-shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, terj. Yudi(Cet. I; Jakarta: Zahra, 2008), h. 155.

⁴Muhammad Baqir Ash-shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, terj. Yudi(Cet. I; Jakarta: Zahra, 2008), h. 149.

1. Distribusi Sumber-sumber Produksi (*Distribution pra-production*)

Dalam pembahasan distribusi sumber-sumber unsur kekayaan alam seperti tanah, dan sumber daya alam yang lain, dimasukkan sebagai kekayaan primer.⁵ karena itu, Sadr mendiskusikan status kepemilikan kekayaan sumber daya alam, ke dalam empat kategori, misalnya, daratan, bahan-baku (sumber alam) di daratan, air alami dan sisanya kekayaan (sungai/hasil, laut, binatang, tumbuh-tumbuhan). Sebuah ringkasan pandangan Baqr Ash-shadr tentang kepemilikan sumber-sumber daya alam untuk produksi sebagai berikut:

Tabel 1.1 Kepemilikan Tanah

Kategori Tanah/bentuk	Tanah yang ditanami (Pertanian)	Tanah Kosong/Lahan tidak terpakai	Secara alami membentuk lahan yang tertanami (hutan)
Penaklukan Tanah	Kepemilikan umum (Khalayak) penduduk membayar pajak yang digunakan untuk masyarakat secara keseluruhan	Kepemilikan pemerintah, individu dapat memperoleh hak untuk menggarapnya lewat buruh pajak kepada pemerintah.	Kepemilikan pemerintah, individu dapat memperoleh hak untuk menggarapnya.
Tanah hasil Da'wah	Kepemilikan pribadi oleh para penduduk.	Kepemilikan pemerintah, individu dapat memperoleh hak untuk menggarapnya.	Kepemilikan pemerintah individu dapat memperoleh hak untuk menggarapnya.
Tanah hasil perjanjian	Tergantung pada perjanjian, kepemilikan pribadi atau (masyarakat)	Kepemilikan pemerintah	Kepemilikan pemerintah

⁵Chibli Mallat, *The Renewal of Islamic Law*, Penerjemah: Santi Indra astuti (Bandung: Mizan, 2001), h. 191.

Tanah lainnya	Kepemilikan pemerintah	Kepemilikan pemerintah	Kepemilikan pemerintah
---------------	------------------------	------------------------	------------------------

Tabel 1.2 Kepemilikan Sumber Daya lain

Sumber Alam/ Bentuk	Zahir (Terbuka) (Sudah dalam bentuk yang terselesaikan)	Batin (Tersembunyi) (Belum dalam bentuk terselesaikan)
Sumber Alam di tanah (minyak, batubara, dan sebagainya).	Kepemilikan umum dan kepemilikan pemerintah Negara	Jika dekat kepermukaan-kepemilikan umum atau pemerintah, Jika dalam/membutuhkan usaha-kepemilikan pemerintah adalah aturannya tetapi kepemilikan pribadi untuk sejumlah penggalian di area tambang.
Air alami	Lautan, sungai-Kepemilikan umum	Sumber dan mata air-kepemilikan umum dan hanya prioritas penggunaan
Kekayaan alam lainnya	Kepemilikan pribadi dibolehkan lewat bekerja, menangkap burung, dan memotong kayu, dan sebagainya.	

Menurut Baqr Ash-shadr sebagaimana yang dikutip Mohammad Aslam Haneef ada beberapa yang perlu diketahui, mengenai distribusi kekayaan sumber-sumber produksi dan hubungannya dengan kepemilikan:

- a. Kepemilikan oleh negara merupakan jenis kepemilikan yang hak pakai dapat diperoleh dari negara.
- b. Kepemilikan swasta hanya diizinkan di dalam sejumlah kecil keadaan:
 - 1) Tanah yang digarap di wilayah penduduk yang menerima Islam secara sukarela (melalui dakwah),
 - 2) Jika ditetapkan di dalam perjanjian,

- 3) Mineral tersembunyi yang memerlukan usaha untuk mendapatkannya, dan hanya sejauh mineral yang gaji saja serta di seluas area pertambangan saja,
 - 4) Sumber daya lain, yakni melalui kerja atau tenaga kerja orang, Seperti penangkapan burung, penebangan kayu, dan sebagainya,
- c. Kepemilikan swasta hanyalah terbatas pada hak pakai, prioritas penggunaan dan hak untuk mencegah orang lain memakai barang sedang dimiliki oleh orang lain,
- d. Untuk mineral dan air, individu diperkenankan untuk menggunakan apa yang mereka perlukan.⁶

Menurut analisa penulis, dalam pembahasan konsep distribusi sumber-sumber produksi (*Distribution pra-production*) merupakan suatu proses dalam aktivitas ekonomi yang sangat esensial dalam pemikiran Muhammad Baqr Ash-shadr. Hal ini, karena distribusi merupakan proses pembagian kekayaan sumber daya alam yang menjadi bagian yang sangat penting bagi kebutuhan dan kerja manusia.

Kebutuhan dan kerja manusia merupakan sebuah komponen yang tidak dapat dipisahkan dengan distribusi. Hal ini, sebagaimana yang dikutip Mohammed Haneef dalam buku *Iqtishaduna* Muhammad Baqr Ash-shadr mengenai distribusi: “Distribusi merupakan bagian dari sistem sosial, yakni bagian dari hubungan total antarmanusia.”⁷

Menurut analisa penulis, dari kutipan Mohammed Haneef dalam buku *Iqtishaduna*, dapat diketahui bahwa distribusi merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam masyarakat, karena aktivitas distribusi berkaitan dengan sistem

⁶Muhammad Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Analisis Komparatif Terpilih*, terj. Suherman Rosyidi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 142.

⁷Muhammad Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Analisis Komparatif Terpilih*, terj. Suherman Rosyidi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 134.

sosial yang meliputi aktivitas sosial ekonomi dimana pemenuhan hak dan kewajiban seseorang merupakan tanggung jawab bersama di dalam suatu masyarakat maupun negara. oleh sebab itu, distribusi merupakan bagian dari hubungan total antarmanusia.

Kekayaan alam dan harta, pada dasarnya merupakan kemilikan mutlak Allah Swt, sebab dalam keyakinan doktrinal Islam menyatakan bahwa manusia tidaklah memegang hak kepemilikan atas barang dan kekayaan, akan tetapi mereka hanya dititipi sebagai anugerah atas penunjukkan mereka sebagai khalifah (wakil) tuhan yang dipercayakan padanya untuk menjaga serta memanfaatkan harta kekayaan tersebut untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia.⁸ karena itu, dalam pemikiran Muhammad Baqr Ash-shadr membagikan sumber-sumber produksi kedalam tiga institusi kepemilikan yaitu:

a. Kepemilikan pribadi

Kepemilikan pribadi merupakan kepemilikan dimana seorang individu atau pihak tertentu berhak menguasai suatu properti secara eksklusif dan berhak mencegah individu atau pihak lain dari menikmati manfaat dalam bentuk apapun dari properti yang apabila ada kebutuhan atau keadaan yang meniscayakan demikian. Contoh: kayu hutan yang ditebang sendiri oleh seseorang atau sejumlah air yang diambil dari seseorang dari sungai dengan tangannya sendiri.

b. Kepemilikan publik atau bersama

Kepemilikan publik atau bersama merupakan Kepemilikan publik (*public ownership*) merupakan hak penguasaan atas properti milik umat atau masyarakat keseluruhan.

⁸Muhammad Baqir Ash Shadr, *Ringkasan Iqtishaduna: Ekonomi Kita*, (Yogyakarta: Rausyan Fikr, 2014), h, 43.

c. Kepemilikan Negara

Kepemilikan negara (state ownership) merupakan hak penguasaan atas properti milik mandat ilahiah negara Islam, yakni Nabi Muhammad Saw atau Imam. Misalnya Penguasaan atas tambang, sebagaimana diriwayatkan dalam sejumlah teks hukum. Dalam hal ini, institusi kepemilikan negara yang dengannya kepala negara sebagai (*waliyyul amr*), mempunyai peran penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi di dalam suatu masyarakat.

Menurut Baqr Ash-shadr Sumber-sumber produksi yang akan di bagikan kedalam hak atas kepemilikan kekayaan alam terdiri dari :

1. Tanah

Tanah merupakan unsur kekayaan alam yang penting dalam kegiatan produksi.

2. Substansi-substansi primer, merupakan unsur kekayaan alam yang terkandung dalam perut bumi, seperti batu bara, belerang, minyak, emas, dan lain sebagainya.

3. Aliran sungai merupakan salah satu unsur kekayaan alam yang penting dalam kehidupan material manusia, yang berperan besar dalam proses produksi dan agrikultural.

4. Berbagai kekayaan alam lainnya, merupakan salah satu unsur kekayaan alam terdiri atas kandungan laut, seperti mutiara dan hewan-hewan laut, kekayaan yang ada dipermukaan bumi, seperti berbagai jenis hewan dan tumbuhan kekayaan yang tersebar diudara, seperti berbagai jenis burung dan oksigen, kekayaan alam yang tersembunyi seperti air terjun yang bisa

menghasilkan tenaga listrik yang dapat dialirkan melalui kabel ke titik manapun juga berbagai alam kekayaan alam lainnya.⁹

Menurut analisa penulis, berdasarkan uraian diatas mengenai distribusi hak kepemilikan sumber-sumber daya alam untuk produksi merupakan suatu proses yang sangat esensial dalam pemenuhan kebutuhan dan kerja setiap individu. Adanya distribusi sumber-sumber daya alam untuk produksi yang kemudian dibagikan kedalam tiga institusi kepemilikan bukan menjadikan kepemilikan tersebut menjadi mutlak dimiliki. Hal yang lain mesti diketahui, bahwa dalam konsepsi doktrin ekonomi Islam, kepemilikan sumber daya alam maupun kekayaan produktif yang dihasilkan dari proses kerja produksi, pada hakekatnya milik yang Maha Kuasa yaitu Allah Swt, manusia hanya dititipi sebuah amanah untuk mengelola, menjaga serta memanfaatkan harta dan kekayaan itu demi kepentingan dan kesejahteraan umat manusia dalam menjaga keseimbangan sosial ekonomi dimasyarakat.

Sedangkan dalam pandangan sistem ekonomi kapitalisme, mereka tidak melihat kekayaan masyarakat secara keseluruhan hanya mengkaji masalah-masalah distribusi kekayaan yang dihasilkan yakni pendapatan nasional dan bukan kekayaan nasional secara keseluruhan.¹⁰ Pendapatan nasional dalam pandangan sistem ekonomi kapitalisme merupakan seluruh barang modal dan jasa yang dihasilkan dalam Istilah yang lebih jelas adalah nilai cash (uang) seluruh kekayaan yang dihasilkan selama satu tahun. Karena itu, ketika produksi dalam pandangan sistem ekonomi kapitalisme mendahului distribusi itu, merupakan suatu hal yang wajar, karena yang mereka distribusikan adalah nilai uang dari

⁹Muhammad Baqir Ash-shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, terj.Yudi (Cet. I; Jakarta: Zahra, 2008), h. 156.

¹⁰Muhammad Baqir Ash-shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, terj.Yudi (Cet. I; Jakarta : Zahra, 2008), h. 427.

barang-barang produktif diantara faktor-faktor dan sumber-sumber produksi. Hal ini, dikarenakan dalam pandangan kapitalisme produksi barang-barang dan jasa merupakan sumber utama kemakmuran suatu negara.¹¹

Pandangan kapitalisme, tentang kepemilikan sumber daya alam sangat berkaitan dengan produksi, dimana individu di beri kebebasan seluas-luasnya untuk mengeksploitasi sumber daya alam, sehingga mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, sifat kapitalisme yang individual dan materialis memandang kekayaan merupakan tujuan akhir dari segalanya, sehingga kekayaan itu hanya dinikmati oleh sebagian orang saja, dan mengakibatkan yang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin.¹²

Sedangkan dalam pandangan Marxisme dalam pandangan metodologi umum penafsiran sejarahnya, memandang bahwa kepemilikan sumber-sumber produksi merupakan suatu hal yang langsung terkait dengan bentuk dominan produksi. Menurut Marxisme, setiap bentuk produksi pada fase historisnya menentukan cara distribusi sumber-sumber material produksi dan kelas produksi yang memilikinya.¹³

Hal ini justru berbeda dalam pandangan sistem ekonomi Islam Muhammad Baqr Ash-shadr yang menyatakan bahwa:

“Proses distribusi sumber-sumber produksi yang dasar mendahului dari proses produksi itu sendiri”.¹⁴

Distribusi dalam pemikiran Muhammad Baqr Ash-shadr menjadi titik awal atau tingkatan pertama dalam sistem ekonomi Islam. Menurutnya, proses produksi

¹¹Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Edisi Ketiga*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 29.

¹²Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 134.

¹³Muhammad Baqir Ash-shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, terj.Yudi (Cet. I; Jakarta: Zahra, 2008), h. 154.

¹⁴ Muhammad Baqir Ash-shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, terj.Yudi(Cet. I; Jakarta: Zahra, 2008), h. 150.

atau aktivitas produksi tidak akan pernah berlangsung tanpa di dahului oleh distribusi sumber-sumber produksi itu sendiri, dikarenakan distribusi sumber-sumber kekayaan alam untuk produksi menjadi bagian paling esensial bagi kehidupan manusia.

Menurut analisa penulis, bahwa kepemilikan sumber-sumber produksi yang belum di miliki oleh manusia, akan menimbulkan kesenjangan sosial. Hal ini, dikarenakan setiap manusia memiliki kebutuhan, keinginan, dan hasrat yang harus dipenuhi. Tentunya dengan berkembangnya kebutuhan manusia dengan tingkat yang berbeda-beda, mengharuskan adanya suatu sistem distribusi sumber-sumber produksi yang mengatur hak kepemilikan kekayaan alam tersebut.

Sistem ekonomi Islam hadir membawa peran positif bagi kehidupan manusia dengan cara mendistribusikan kekayaan alam dan apa pun yang dikandungnya serta membagi semua itu ke dalam sejumlah kepemilikan, diantaranya kepemilikan pribadi, kepemilikan publik atau bersama, dan kepemilikan negara.

Hal ini sejalan dengan pandangan Muhammad Baqr Ash-shadr mengatakan bahwa sistem manajemen kepemilikan memiliki dampak yang nyata bagi aktivitas distribusi, bahkan menjadikan landasan asas bagi aktivitas ekonomi lainnya. Jadi disini dapat dipahami bahwa yang menjadi titik awal atau tingkatan pertama sistem ekonomi Islam adalah distribusi, bukan produksi sebagaimana dalam ekonomi-politik tradisional. Dalam sistem ekonomi Islam, distribusi sumber-sumber produksi mendahului proses produksi, dan setiap organisasi yang terkait dengan proses produksi otomatis berada pada tingkatan kedua.

a. Sumber Asli Produksi

Dalam ekonomi politik, sumber-sumber produksi terbagi ke dalam tiga kriteria sebagai berikut:

- 1) Alam
- 2) Modal (barang-barang modal)
- 3) Kerja, termasuk organisasi yang dengannya sebuah proyek (rencana) disusun dan dijalankan.

Modal (barang-barang) merupakan kekayaan yang dihasilkan (*produced wealth*) dan bukan merupakan sumber asli produksi, karena setiap barang jadi (*finished good*) dihasilkan oleh kerja manusia pada gilirannya berperan menghasilkan kekayaan lagi. Misalnya, sebuah mesin yang memproduksi tekstil bukanlah sebuah kekayaan yang murni natural. Mesin tersebut merupakan bahan natural yang telah dibentuk oleh kerja manusia dalam sebuah proses produksi.¹⁵

Kerja (*amal*) dan kebutuhan (*hajat*) merupakan suatu perangkat distribusi dalam perspektif Islam, kerja merupakan alat distribusi paling primer dipandang dari sudut kepemilikan. Seorang pekerja akan memetik hasil dan memilikinya.¹⁶ Sedangkan kebutuhan (*hajat*) merupakan perangkat distribusi primer sebagai pernyataan hak manusia dalam kehidupan yang sangat esensial. Namun disisi lain, Baqr Ash-shadr menambahkan properti sebagai perangkat distribusi.¹⁷

Menurut analisa penulis, bahwa dalam pandangan Muhammad Baqr Ash-shadr, seorang pekerja mempunyai konsep sentral yaitu menurunkan properti, sebagai elemen sekunder distribusi dan dibatasi oleh sebuah agama. Properti menurut Baqr Ash-shadr adalah sebuah alat distribusi sekunder melalui aktivitas komersial yang diizinkan islam dalam syarat-syarat yang tidak bertentangan

¹⁵ Muhammad Baqir Ash-shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, terj. Yudi (Cet. I; Jakarta: Zahra, 2008), h. 153.

¹⁶ Chibli, Mallat, *Menyegarkan Islam. Alih Bahasa Santi Indra Astuti*, (Cet I, Bandung: Mizan, 2001), h. 180.

¹⁷ Chibli, Mallat, *Menyegarkan Islam. Alih Bahasa Santi Indra Astuti*, (Cet I, Bandung: Mizan, 2001), h. 181

dalam prinsip-prinsip Islam mengenai keadilan sosial. Sementara kerja merupakan sebuah elemen abstrak dan *immaterial*, bukan sebuah faktor material yang dapat masuk ke dalam ruang lingkup kepemilikan pribadi atau kepemilikan publik. Atas dasar ini, hanya alam yang bisa menjadi subjek kajian karena ia merupakan unsur material yang mengalami proses produksi.

b. Perbedaan berbagi posisi doktrinal ihwal Distribusi sumber-sumber produksi.

Dalam masalah distribusi sumber-sumber daya alam untuk produksi (*mashadir ath thabi'ah al 'intaj*)¹⁸ Islam berbeda dari kapitalisme dan marxisme dalam kekhususan-kekhususan dan perincian-perinciannya.

Islam dalam hal kepemilikan membatasi kebebasan individu dalam memiliki sumber-sumber produksi. karena masalahnya menurut Islam, kebutuhan bukan terletak pada suatu sistem distribusi *instrument* (sarana) sehingga sistem distribusi berubah setiap kali produksi demi pertumbuhannya membutuhkan suatu sistem (distribusi baru).¹⁹

Menurut analisa penulis, dapat disimpulkan bahwa yang dibutuhkan merupakan pemenuhan segenap kebutuhan dan keinginan dalam kerangka manusiawi, dimana dengan manusia atau individu tersebut, dapat menumbuhkan kembangannya eksistensinya sebagai seorang manusia. Ketika hubungan diantara manusia dan masyarakat sudah terjalin atau terwujud, maka berbagai kebutuhan dan keinginan masyarakat melalui institusi kepemilikan bersama atas sumber-sumber produksi tertentu akan muncul.

Hal ini, dikarenakan masih banyak individu yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya melalui kepemilikan pribadi, sehingga para individu akan merasa

¹⁸Muhammad Baqir Ash-shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, terj. Yudi (Cet. I; Jakarta: Zahra, 2008), h. 397.

¹⁹Muhammad Baqir Ash-shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, terj. Yudi (Cet. I; Jakarta: Zahra, 2008), h. 398.

tertekan karena tidak bisa memenuhi kebutuhannya, dan akibatnya akan menimbulkan ketidakseimbangan sosial ekonomi di dalam masyarakat. Karena itu, Islam hadir dan muncul memberikan hak kepemilikan yakni kepemilikan negara, yang dengannya *waliyyul amr* sebagai kepala negara dapat menjaga keseimbangan sosial ekonomi itu, di dalam masyarakat.

Dengan cara inilah distribusi sumber-sumber kekayaan alam untuk produksi dijalankan dengan membagi sumber-sumber tersebut kedalam tiga kepemilikan, yaitu kepemilikan pribadi, kepemilikan publik atau kepemilikan bersama, dan kepemilikan negara.

2. Distribusi Kekayaan Produktif (*Post - Production Distribution*)

Pada pembahasan distribusi kekayaan produktif (*post-production distribution*) akan lebih berfokus kepada hasil dari proses kombinasi kepemilikan sumber-sumber produksi yang dihasilkan manusia melalui kerja. Dalam pembahasan sebelumnya, mengenai distribusi sumber-sumber produksi merupakan suatu proses yang dapat dipahami bahwa *pertama*, pekerja yang melakukan kerja pada kekayaan alam menjadi pemilik dari hasil kerjanya. *Kedua*, pekerja yang melakukan kerja mempunyai tanggung jawab sosial untuk mendistribusikan sebagian dari hasil kerjanya melalui kebijakan pemerintah (*waliyyul 'amr*) sebagai salah satu bentuk pengakuan atas tanggung jawab sosial mereka.²⁰

Menurut Muhammad Baqr Ash-shadr, mengenai distribusi kekayaan produktif dalam buku *Iqtishaduna*:

“Kekayaan produktif merupakan komoditas (barang-barang modal dan asset tetap (*fixed asset*) yang merupakan hasil dari proses kombinasi sumber-sumber produksi yang dilakukan oleh manusia dengan kerja”.

²⁰ Aziz, “An Islamic Perspective on Political Economy: The Views of (late) Muhammad Baqir al-Sadr”, *Journal Ahlul Bayt Digital Islamic Library Project*, Vol. 10. No. 1, 2018, h. 4.

Menurut analisa penulis, berdasarkan uraian dari pemikiran Muhammad Baqr Ash-shadr dapat dipahami, bahwa kekayaan produktif merupakan hasil kerja manusia melalui proses sumber-sumber produksi, dimana hasil tersebut dapat dinilai dengan uang. Dalam doktrin ekonomi Islam uang merupakan sesuatu yang harus tersedia dan berputar diantara individu sedemikian hingga setiap anggota masyarakat mampu hidup dalam standar hidup yang umum. Hal ini karena, harta mempunyai fungsi sosial di dalam masyarakat.

Menurut Muhammad Baqir Ash-shadr sebagaimana dikutip Mohammed Abdul Haneef, mengakui adanya empat imbalan yang merupakan sumber pendapatan bagi masing-masing faktor produksi antara lain:

a. Tenaga kerja-Upah atau bagian laba

Upah merupakan bentuk pendistribusian harta dalam Islam yang direalisasikan dalam bentuk usaha atau pekerjaan tertentu. Namun, dalam pemikiran Baqr Ash-shadr membagi upah menjadi dua pilihan :

1) Upah (Imbalan tetap)

Upah (imbalan tetap) merupakan imbalan yang diterima oleh tenaga kerja atas kontribusi terhadap proses produksi suatu produk sehingga dari hasil kerjanya itu, ia menerima upah (imbalan tetap).

2) Upah (bagian laba)

Upah (bagian laba) merupakan imbalan yang diterima karena melakukan sebuah transaksi atau mengambil sewa tanah kemudian menyewakannya kepada orang lain lebih mahal dengan memakai sistem akad /kerjasama transaksi yang berlandaskan syariah seperti, *mudharabah*, *muzara'ah* (bagi hasil tanam), *musaqat*, dan *jualah* (*upah*).

Sedangkan upah menurut Abdul Mannan adalah upah yang ditentukan oleh keseimbangan antara kekuatan permintaan dan persediaan.²¹ Mannan merepresentasikan pemikirannya dengan pendekatan Qur'ani bahwa dalam penentuan upah itu berdasarkan kemampuan dan bakat.

b. Tanah- Sewa (bagi hasil tanam)

Sewa merupakan kelebihan yang diperoleh dari suatu kesatuan khusus dalam produksi sehingga melebihi minimum yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaannya. Adapun sadr memperbolehkan melakukan sistem kerja sama akad sewa seperti akad *muzara'ah* (bagi hasil tanam).

c. Modal uang- bagian laba

Modal uang merupakan bagian dari laba, dalam proses aktivitas produksi modal uang sangat esensial bagi keberlanjutannya, proses atau hasil (output) produksi itulah disebut dengan laba.

d. Alat/modal fisik-Upah/Kompensasi²²

Alat/modal fisik merupakan suatu komponen yang saling terkait, sehingga untuk mendapatkan upah/kompensasi tersebut maka kerja yang disertai dengan modal fisik yang baik maka akan memperoleh upah/kompensasi yang baik pula.

Menurut analisa penulis, dapat disimpulkan bahwa Muhammad Baqr Ash-Shadr mengakui adanya empat sumber pendapatan bagi masing-masing faktor produksi. Upah dalam perspektif Muhammad Baqr Ash-Shadr merupakan hasil usaha dari kerja yang direalisasikan dalam bentuk harta sedangkan menurut

²¹M.Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Cet; 3 Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1997), h. 118.

²²Muhammad Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Analisis Komparatif Terpilih*, terj. Suherman Rosyidi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 134.

Muhammad Abdul mannan upah ditentukan oleh keseimbangan antara kekuatan permintaan dan persediaan.

Berdasarkan pembahasan Distribusi kekayaan produktif (*Post - Production Distribution*) diatas menunjukkan bahwa imbalan yang sah atau halal itu merupakan imbalan yang di dasarkan pada kerja. Karena itu Islam dalam pandangan Muhammad Baqir Ash-shadr melihat bahwa kekayaan produktif merupakan kekayaan langsung yang dihasilkan oleh seorang pekerja yang harus didistribusikan kembali kepada masyarakat umum, sehingga kekayaan tersebut dapat mewujudkan keseimbangan sosial di dalam masyarakat, dimana kekayaan tersebut berputar di antara para individu sehingga setiap anggota masyarakat mampu hidup dalam standar hidup yang umum.

Hal ini dikarenakan, menurut Muhammad Baqr Ash-shadr realitas sosial terdapat masyarakat yang tidak mampu terlibat dalam proses produksi, sedangkan disisi lain, kebutuhan dasar mereka harus tetap terpenuhi. Disinilah kekayaan produktif di distribusikan oleh negara yang kemudian dipungut melalui pajak, zakat, khums, fay dan anfal kemudian dibelanjakan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan keseimbangan sosial di masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan keseimbangan sosial di masyarakat melalui distribusi pendapatan maka negara sebagai *waliyyul amr*’ memungut pajak atau zakat, khums, fay, dan anfal. Menurut Muhammad Baqr Ash-shadr tentang keseimbangan sosial didasarkan pada asumsi dasar Yaitu:

“Fakta *Haqiqah Kauniyyah* (fakta kosmik) dan Fakta *Haqiqah Mazhabiyah* (fakta doktrinal)”.

Fakta kosmik adalah perbedaan yang eksis diantara para individu manusia berkenaan dengan kecakapan mental (intelektual) dan fisik, serta kecendrungan (bakat). Perbedaan yang terdapat pada individu tersebut akan melahirkan perbedaan yang lain dalam masyarakat. Hal, inilah yang disebut strata sosial.

Perbedaan tersebut bukanlah hasil dari proses sejarah yang sifatnya aksidental seperti yang dipahami kaum sosialis (Marx).

Sedangkan Fakta *Haqiqah Mazhabiyah* (fakta doktrinal) merupakan hukum distribusi yang menyatakan bahwa kerja yaitu basis dari properti privat beserta hak apa pun atasnya. Perbedaan kuantitas dan kualitas dalam kerja akan berdampak pada perbedaan penghasilan. Berdasarkan dua asumsi dasar yang telah diuraikan diatas, Baqr Ash-shadr menyimpulkan:

“Keseimbangan Sosial merupakan keseimbangan standar hidup di antara para Individu dalam masyarakat, bukan keseimbangan pendapatan”.²³

Menurut analisa penulis, mengenai keseimbangan sosial ialah dimana keseimbangan sosial di dalam masyarakat itu, uang harus tersedia dan berputar di antara para individu sedemikian hingga masyarakat mampu hidup dalam satu standar hidup yang umum. Adanya keseimbangan standar hidup di dalam masyarakat, akan mampu membawa seluruh masyarakat beroleh pijakan yang sama dalam berusaha. Hal inilah, yang mendasari pemikiran Baqr Ash-shadr bahwa keseimbangan standar hidup diantara para Individu dalam masyarakat lebih penting daripada keseimbangan pendapatan.

Dalam distribusi kekayaan produktif merupakan suatu hal yang sangat esensial dalam kehidupan masyarakat, karena dalam proses kerja, tidak semua manusia mempunyai bakat maupun kemampuan yang sama dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini dikarenakan, Allah swt telah membatasi mereka dengan ketetapan yang sudah menjadi hal yang mesti disyukuri oleh setiap manusia, sebagaimana dalam pemikiran Baqr Ash-shadr yang telah diuraikan sebelumnya. Untuk mewujudkan keseimbangan sosial ekonomi di dalam masyarakat fakta doktrinal menjadi salah satu aspek yang perlu dipahami bahwa karena adanya

²³Muhammad Baqir Ash-shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna* terj.Yudi, (Cet. I; Jakarta : Zahra, 2008), h. 469.

perbedaan kemampuan, dan bakat sehingga menghasilkan pendapatan yang berbeda-beda. Karena itu, hukum distribusi kekayaan produktif dalam pandangan Baqr Ash-shadr mempunyai tujuan untuk menciptakan keseimbangan sosial ekonomi di masyarakat, dimana uang yang kemudian dihasilkan dari kekayaan produktif melalui mekanisme kerja tadi, itu tersedia dan berputar di dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup dalam keseimbangan standar hidup yang umum. Hal sebagaimana dalam firman Allah Swt yang termaktub dalam Q.S. Al-Hasyr: 59/7.

...كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ...

Terjemahan:

“Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”. (Q.S. Al-Hasyr: 59/7).

Menurut Quraishy Shihab, ayat tersebut bermaksud untuk menegaskan bahwa harta benda harus beredar di masyarakat, sehingga dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat dengan tetap mengakui hak kepemilikan dan melarang monopoli, karena sejak awal Islam menetapkan harta memiliki fungsi sosial.²⁴

Menurut Muhammad Baqr Ash-shadr dalam buku *Iqtishaduna* mengatakan bahwa:

“Kekayaan atau Pendapatan maupun peningkatannya merupakan suatu tujuan yang sangat penting, namun bukan tujuan akhir, melainkan tujuan antara. Jika di dalam suatu masyarakat peningkatan kekayaan atau pendapatan itu meningkat namun tidak tercipta kesejahteraan dan kenyamanan di antara para anggota masyarakat, dan tidak membuat mereka bisa mengoptimalkan potensi serta bakat alamiah mereka, maka peningkatan kekayaan tidak menjalankan peran positif di dalam kehidupan manusia.”²⁵

Berdasarkan, analisa penulis diatas mengenai kekayaan atau pendapatan. Maka, dapat dipahami bahwa kekayaan atau pendapatan merupakan suatu tujuan

²⁴M. Quraishy Shihab. “*Tafsir Al-Misbah Volume 14*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 525.

²⁵Muhammad Baqir Ash-shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna* terj.Yudi, (Cet. I; Jakarta : Zahra, 2008), h. 428-429.

yang sangat penting, namun yang paling penting adalah pendistribusiannya. Karena kekayaan atau pendapatan di dalam masyarakat berupa uang merupakan harta yang mempunyai fungsi sosial, dimana kekayaan atau pendapatan ini harus mempunyai dampak yang positif di dalam masyarakat yaitu terciptanya kesejahteraan dan kenyamanan hidup di dalam masyarakat serta keseluruhan masyarakat dapat menumbuhkembangkan ekstensinya melalui kesempatan kerja maupun lainnya.

Dasar teoritis dari gagasan diatas dapat dipahami bahwa dalam kekayaan atau pendapatan terdapat setiap hak masyarakat di dalamnya baik itu kekayaan sumber daya alam (sumber-sumber produksi) maupun kekayaan produktif yang dihasilkan dari kombinasi kerja sumber-sumber produksi yang dinilai dengan uang.

Negara sebagai *Waliyyul amr* sebagai kepala negara mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan sarana untuk memelihara standar kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan, sumber kekayaan alam telah diciptakan bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya bagi sekelompok orang. Sebagaimana dalam firman Allah Swt yang termaktub dalam Q.S. Al-Baqarah: 2/29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahan:

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”.(Q.S. Al-Baqarah: 2/29).

Menurut Baqr Ash-shadr, bahwa maksud ayat diatas menjelaskan bahwa setiap individu dalam masyarakat berhak atas manfaat kekayaan alam dan berhak

atas hidup yang layak berkat manfaat kekayaan tersebut.²⁶ Demikianlah, masyarakat secara keseluruhan berhak atas manfaat kekayaan alam dan juga sektor-sektor penerimaan negara yang diperoleh dari pemungutan, *Zakat*, Pajak,

Penerimaan Negara	Pengeluaran Negara
<i>Zakat</i> dan Pajak	Disimpan di baitulmal dan akan dibagikan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan (jaminan sosial)
<i>Khums</i>	Di distribusikan kepada kaum miskin tanpa diskriminasi apakah dia muslim atau nonmuslim

Khums, *Kharaj*, *Anfal*, dan *Fai*'. Penerimaan negara yang diperoleh dari sektor publik seperti pajak, zakat, khums, kharaj, Anfal, dan Fai yang terkumpul dalam *baitul mal* merupakan pungutan negara yang diperoleh dari masyarakat yang berasal dari kekayaan sumber daya alam itu sendiri maupun dari hasil proses kerja produksi dan pungutan-pungutan lainnya.

²⁶Muhammad Baqir Ash-shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna* terj.Yudi, (Cet. I; Jakarta : Zahra, 2008), h. 462.

<i>Kharaj</i>	Disimpan untuk cadangan darurat, membiayai angkatan perang dan kebutuhan Ummat
<i>Anfal dan Fai'</i>	Membayar gaji penyelenggara negara (pegawai pemerintahan), Membangun rumah sakit, menyediakan fasilitas pendidikan, dan fasilitas umum

Berdasarkan penerimaan dan pengeluaran negara diatas dalam pemikiran Muhammad Baqr Ash-shadr mengatakan bahwa untuk merealisasikan penerimaan negara di dalam masyarakat, distribusi kekayaan negara menjadi suatu hal yang mutlak dilakukan demi untuk menciptakan keseimbangan sosial di masyarakat, dimana dengan kebijakan negara ini mampu merealisasikan jaminan sosial kepada setiap individu di dalam masyarakat, sehingga masing-masing dari individu di masyarakat dapat memperoleh haknya untuk hidup yang layak berkat manfaat penerimaan negara tersebut.

Kebijakan negara dalam memperoleh penerimaan negara dengan memungut *zakat, pajak, khums, kharaj, Anfal, dan fai'* yang kemudian dikumpulkan dalam *baitul mal* merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah agar kekayaan tidak terkonsentrasi pada segelintir orang kaya saja, sehingga kekayaan dapat tersedia dan berputar di dalam masyarakat secara umum.²⁷

Menurut Muhammad Baqr Ash-Shadr dalam pemikirannya bahwa prinsip jaminan sosial dilakukan dengan bentuk yaitu:

- a) Negara harus memberikan kesempatan yang luas bagi setiap individu untuk melakukan kerja produktif sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari kerja dan usahanya sendiri.

²⁷F.R. Faridi, "Theory of Fiscal Policy in an Islamic State", *Journal J.Res. Islamic Econ* Vol. 1 No. 1, 1983, h. 17.

- b) Individu yang tidak mampu melakukan kerja produktif, negara mempunyai kewajiban mengaplikasikan jaminan sosial bagi setiap kelompok dalam bentuk uang tunai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk memperbaiki standar kehidupannya

Menurut analisa penulis mengenai uraian jaminan sosial diatas, dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok pikiran Baqr Ash-shadr dalam merefleksikan pengeluaran negara yaitu mengkhususkan distribusi anggaran pendapatan negara dan belanja negara kepada sektor jaminan sosial. Dimana negara harus hadir untuk memberikan jaminan sosial kepada seluruh masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar sesuai dengan standar hidup masyarakat Islam.

Jaminan yang dimaksud di sini merupakan jaminan pemeliharaan, pemberian bantuan dan sarana agar individu bisa hidup sesuai dengan standar hidup masyarakat Islam dan mempertahankannya. Maksudnya, jika secara umum secara standar umum Islam meningkat, maka harus meningkat pula standar hidupnya.²⁸ Hal ini sebagaimana peningkatan pendapatan dalam suatu negara, ketika di dalam suatu negara dalam penerimaan pendapatannya meningkat, maka kesejahteraan di dalam suatu masyarakat pun juga harus meningkat. Demikian pula, negara wajib memenuhi seluruh kebutuhan individu di luar kebutuhan pokok, yakni segala kebutuhan yang pemenuhannya membuat kehidupan individu berada dalam standar hidup masyarakat Islam yaitu memberikan kesempatan kerja produktif bagi setiap individu di masyarakat sehingga ia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dari kerja dan usahanya sendiri.

²⁸ Muhammad Baqir Ash-shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna* terj. Yudi, (Cet. I; Jakarta : Zahra, 2008), h. 460.

Sebagaimana Islam telah memformulasikan prinsip keseimbangan sosial, ia juga telah melengkapi negara dengan wewenang yang diperlukan dalam usaha mengaplikasikan prinsip tersebut. Esensi dari wewenang tersebut dapat disimpulkan dalam poin berikut ini:²⁹

- a) Pemberlakuan pajak-pajak permanen yang sinambung dan memanfaatkan pajak-pajak itu demi kepentingan keseimbangan sosial.
- b) Menciptakan sektor-sektor publik dengan properti negara dan menjadikannya sebagai investasi yang menguntungkan, di mana keuntungan itu dimanfaatkan demi kepentingan keseimbangan sosial.
- c) Aturan-aturan hukum Islam yang meregulasi berbagai bidang yang berbeda dalam kehidupan ekonomi.

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai distribusi pendapatan negara Menurut Baqr Ash-shadr dapat disimpulkan dalam pemikirannya dapat bahwa distribusi pendapatan negara merupakan suatu proses pembagian atau penyaluran kekayaan atau pendapatan negara yang mencakup keseluruhan aspek atau faktor-faktor yang ikut menentukan pendapatan, baik itu berupa sumber-sumber produksi maupun kekayaan produktif yang berasal daripada hasil kerja produksi atau output produksi dari barang-barang produktif yang dipungut negara melalui pajak, zakat, *khums*, *anfal*, dan *fay'* yang kemudian dimasukkan ke dalam *baitul mal* dan didistribusikan kembali kepada seluruh masyarakat dalam upaya merealisasikan jaminan sosial demi mewujudkan keseimbangan sosial ekonomi di dalam masyarakat.

B. Relevansi Pemikiran Muhammad Baqr Ash-shadr mengenai Distribusi Pendapatan Negara dengan distribusi pendapatan APBN di Indonesia.

²⁹Muhammad Baqir Ash-shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna* terj.Yudi, (Cet. I; Jakarta : Zahra, 2008), h. 474.

Setelah mengetahui pemikiran Muhammad Baqr Ash-shadr tentang distribusi pendapatan negara maka pembahasan berikutnya adalah sejauh mana relevansi pemikiran Muhammad Baqr Ash-shadr mengenai distribusi pendapatan negara dengan distribusi pendapatan APBN di Indonesia.

Distribusi pendapatan negara merupakan persoalan utama yang sampai saat ini masih belum bisa terselesaikan khususnya negara Indonesia. Distribusi pendapatan negara yang tidak merata di dalam masyarakat akan menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi dan mengakibatkan kecumburuan sosial di dalam suatu masyarakat. Masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan terus menjadi perhatian pemerintah, karena itu kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan keseimbangan sosial ekonomi di masyarakat melalui distribusi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang setiap tahunnya ditetapkan dengan undang-undang, dan di dalamnya terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.³⁰ Dalam pengelolaan keuangan negara Indonesia tersebut, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan dan pedoman dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat umum.

Salah satu fungsi dan tujuan dalam kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia adalah fungsi distribusi anggaran, dimana pemerintah mengatur keseimbangan anggaran pendapatan antarwilayah maupun kelompok agar dapat menghasilkan keadilan dan kesejahteraan umum di

³⁰Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 288.

masyarakat.³¹ Contohnya: seorang individu yang mempunyai kekayaan dan memiliki potensi yang tinggi wajib mengeluarkan pajak, sedangkan seorang individu yang miskin dan tidak memiliki potensi yang tinggi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, maka negara atau pemerintah harus mendistribusikan anggaran yang cukup dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. Melalui alokasi dana anggaran negara yang cukup untuk didistribusikan kepada setiap individu dalam masyarakat yang membutuhkan.

Konsep distribusi pendapatan APBN di Indonesia pada dasarnya merujuk kepada ideologi dasar dan konstitusi UUD 1945. Dimana, kehidupan dasar ekonomi nasional Indonesia secara spesifik kebangsaan dan doktrin kerakyatan terdapat pada pasal 33, pasal 34, dan pasal 27 UUD 1945. Pasal-pasal ini menjadi rujukan pendistribusian pendapatan yang merupakan benteng nasionalisme ekonomi dan benteng pengutamakan kepentingan kehidupan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam ideologi dasar dan konstitusi UUD 1945 terdapat amanat yang harus dijalankan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menjamin hak warga negara dengan menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan umum bagi semua masyarakat. Landasan hukum Konstitusi dalam UUD 1945 tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pasal 27 ayat 2 yang mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.³²

³¹Aan Jaelani, “*Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia: Tinjauan Keuangan Publik Islam: MPRA Paper*”, (Cirebon: Nurjati Press, 2016), h. 20.

³²Yohandarwati, *Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial*, Direktorat Kependudukan, Kesejahteraan Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan (BAPPENAS: 2002), h. 4-5.

2. pasal 28 D ayat 1, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
3. Pasal 28 H ayat 3, bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
4. Pasal 28 I ayat 4, bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
5. Pasal 31
 - a) Ayat 1, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
 - b) Ayat 2, bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
 - c) Ayat 3, bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
 - d) Ayat 4, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
 - e) Ayat 5, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.³³
6. Pasal 33

³³Yohandarwati, *Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial*, Direktorat Kependudukan, Kesejahteraan Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan (BAPPENAS: 2002), h. 23.

- a) Ayat 1, Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- b) Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,
- c) Ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- d) Ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

7. Pasal 34

- a) Ayat 1, bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- b) Ayat 2, bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- c) Ayat 3, bahwa negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak.³⁴

Berdasarkan landasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diuraikan diatas, dapat dipahami bahwa negara dalam hal ini pemerintah sebagai *waliyyul amr*' (kepala negara) dalam pengelolaan kekayaan negara dan pendistribusiannya harus memperhatikan nilai dan norma keadilan sosial bagi seluruh masyarakat keseluruhan, kemakmuran serta kesejahteraan harus dirasakan

³⁴Sri Edi Swasono, *Membangun Sistem Ekonomi Nasional: Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: UI Press, 1987), h. 140.

oleh semua masyarakat secara keseluruhan bukan hanya dirasakan oleh individu atau perorangan. Karena itu, negara dalam hal ini pemerintah sebagai *waliyyul amr*' atau kepala negara memiliki domain yang sangat penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial di dalam masyarakat melalui distribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pada umumnya semua negara di dunia mempunyai tujuan yang sama yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menciptakan kesejahteraan umum dalam masyarakat. Hal ini tentunya setiap negara memiliki sumber daya alam maupun kekayaan atau pendapatan negara dalam menjalankan fungsi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum di masyarakat. Tujuan dalam mewujudkan kesejahteraan umum di dalam masyarakat tersebut dapat dicapai dengan mengikutsertakan masyarakat dalam upaya mewujudkannya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan salah satu instrumen pengelolaan negara yang memuat rincian penerimaan dan pengeluaran negara yang diterima dari hasil penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, percetakan uang, pinjaman pemerintah, menjalankan berbagai pungutan dari masyarakat yang di dasarkan pada Undang-undang seperti pajak dan lain sebagainya.

Adapun pendapatan atau penerimaan negara Indonesia berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dibedakan menjadi dua jenis yaitu:³⁵

1. Penerimaan negara dalam negeri

³⁵M.Suparmoko, *Keuangan Negara: Dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: BPFE, 2003), h. 25.

- a) Penerimaan negara dalam negeri meliputi, Penerimaan minyak bumi dan gas alam meliputi pajak penghasilan minyak bumi, dan pajak penghasilan gas alam,
- b) Penerimaan negara diluar minyak bumi dan gas alam meliputi:
 - (1) Pajak penghasilan berupa penghasilan perseorangan, seperti hasil potongan penghasilan pekerjaan dan usaha pekerjaan, dan pajak badan seperti BUMN, badan usaha swasta, hasil pengutan kegiatan usaha, dan hasil potongan bunga, deviden, royalty, dan lainnya.
 - (2) Pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah,
 - (3) Bea dan cukai,
 - (4) Pajak ekspor,
 - (5) Pajak bumi dan bangunan,
 - (6) Pajak lainnya, dan
 - (7) Penerimaan bukan pajak meliputi, retribusi, keuntungan dari perusahaan, denda-denda, rampasan, sumbangan masyarakat untuk jasa-jasa yang diberikan pemerintah, pencetakan uang, pinjaman, hadiah, dan sebagainya.
- 2. Penerimaan pembangunan meliputi, bantuan program dan bantuan proyek.
 Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, pengeluaran negara/pemerintah (*government Expenditure*). Hal ini dapat dilihat fungsi distribusi anggaran sebagai berikut:

1) Pelayanan umum

Belanja pelayanan umum, merupakan belanja yang termasuk dalam kategori antara lain belanja operasi untuk organisasi eksekutif dan

legislatif, belanja untuk jasa-jasa umum, belanja riset dasar, belanja transaksi utang, dan belanja administrasi transfer antar-unit pemerintah.³⁶

2) Pertahanan

Belanja pertahanan, belanja dalam kategori ini antara lain belanja pertahanan militer dan sipil, dan bantuan militer untuk asing, riset pertahanan, dan sebagainya.

3) Ketertiban dan keamanan

Belanja ketertiban dan keamanan, belanja dalam kategori antara lain belanja jasa kepolisian, jasa pemadam kebakaran, jasa pengadilan, jasa rumah tahanan, dan penjara serta riset untuk perlindungan publik.

4) Lingkungan hidup

Belanja lingkungan hidup merupakan belanja yang termasuk diantaranya belanja pengolahan limbah dan polusi, proteksi keragaman hewani maupun tata kota.

5) Perumahan dan fasilitas Umum

Belanja dalam kategori ini diantaranya pengembangan perumahan dan pemukiman, sistem penyediaan air bersih, belanja penerangan jalan, dan pekerjaan umum lainnya.

6) Kesehatan

Belanja kesehatan meliputi, perlengkapan dan peralatan kesehatan, jasa kepada pasien, jasa rumah sakit umum, dan risetnya.

7) Parawisata, Budaya, dan Agama

³⁶Nurul Huda, Dkk., *Keuangan Publik Islami : Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 15.

Belanja pariwisata, Budaya, dan Agama meliputi belanja jasa olahraga dan rekreasi, belanja jasa kebudayaan, jasa penyiaran, jasa urusan keagamaan, dan komunitas, dan lain-lain.

8) Pendidikan

Belanja pendidikan, mencakup belanja pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, termasuk belanja pendukung lainnya.

9) Perlindungan Sosial³⁷

Belanja yang termasuk perlindungan sosial mencakup, belanja perlindungan terhadap masyarakat lanjut usia (manula), belanja perlindungan anak dan keluarga, belanja untuk mengatasi pengangguran, dan belanja negara lainnya.

Menurut analisa penulis berkaitan dengan konsep distribusi pendapatan APBN di Indonesia memerlukan campur tangan pemerintah dalam upaya merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) agar mereka yang berpenghasilan rendah dapat memperoleh bagian dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hal ini sebagaimana landasan konstitusi 1945, yang menjamin hak setiap warga negara agar dapat merasakan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Karena itu, Anggaran pendapatan dan Belanja Negara merupakan salah satu instrumen yang dapat melaksanakan tujuan negara yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945 dalam mengatasi berbagai permasalahan bangsa.³⁸

Komitmen Pemerintah Indonesia terhadap pemenuhan hak setiap warga negara dalam memperoleh bagiannya dari pendapatan negara itu direalisasikan melalui sektor jaminan sosial negara. Hal ini, dapat lihat dari kualitas distribusi

³⁷Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 218.

³⁸Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 216.

anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2018, yang rinciannya berikut ini:³⁹

- a. Anggaran untuk pendidikan sebesar Rp. 444,1 triliun.
- b. Anggaran untuk kesehatan sebesar Rp. 110, 0 triliun
- c. Anggaran untuk infrastruktur sebesar Rp. 410, 4 triliun
- d. Anggaran untuk perlindungan sosial Rp. 283, 8 triliun
- e. Anggaran untuk Subsidi energi Rp. 94, 5 triliun.

Menurut analisa penulis, mengenai distribusi pendapatan APBN di Indonesia diatas, terdapat kesamaan terhadap proses penerimaan maupun dalam pendistribusiannya. Muhammad Baqr Ash-shadr, dalam hal penerimaan atau pendapatan negara dalam Baitul Mal ada dua macam penerimaan atau pendapatan yaitu pertama, pendapatan yang diterima dari kepemilikan kekayaan sumber daya alam yang dikuasai negara itu sendiri dan Kedua, kekayaan produktif masyarakat (hasil kerja atau output produksi) yang dihasilkan oleh masyarakat melalui hasil kerja dari kekayaan sumber daya alam, yang dipungut oleh pemerintah berupa, pajak (zakat), *khums*, *anfal*, dan *fay*. Adapun dalam hal pendistribusiannya, negara membagikan kekayaan atau pendapatan negara ke dalam berbagai sektor antara lain sektor pendidikan, Sektor kesehatan, sektor keamanan, sektor pembangunan infrastuktur, dan sektor jaminan sosial, dimana masyarakat yang tidak mampu memperoleh penghasilan atau pendapatan melalui kerja produktif mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah berupa uang tunai untuk memperbaiki standar hidupnya, dan juga memberikan kesempatan yang luas kepada seluruh individu untuk melakukan kerja produktif sehingga ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari usahanya sendiri.

³⁹Kementrian Republik Indonesia, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018, <https://www.kemenkeu.go.id/media/6888/informasi-apbn-2018.pdf> (akses 5 November)

Sedangkan konsep distribusi pendapatan APBN di Indonesia dalam hal penerimaan atau pendapatan negara juga berasal dari kepemilikan kekayaan sumber daya alam yang dikuasai negara itu sendiri dan kekayaan produktif masyarakat (hasil kerja atau output produksi) yang dihasilkan oleh masyarakat melalui hasil kerja dari kekayaan sumber daya alam, yang dipungut oleh pemerintah berupa, Pajak penghasilan perseorangan, seperti hasil potongan penghasilan pekerjaan dan usaha pekerjaan, pajak badan seperti BUMN, badan usaha swasta, hasil pengutan kegiatan usaha, dan hasil potongan bunga, deviden, royalty, dan lainnya. Adapun dalam hal pendistribusiannya, pemerintah mendistribusikan pendapatan negara ke dalam anggaran belanja pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial dan anggaran untuk Subsidi energi.

Berkaitan dengan analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa masing-masing mempunyai tujuan yang sama dalam mendistribusikan pendapatan negara yaitu untuk mewujudkan dan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran kepada seluruh anggota masyarakat dengan memberikan hak kekayaan atau pendapatan negara tersebut adil dan merata.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pemikiran Muhammad Baqr Ash-shadr mengenai konsep distribusi pendapatan negara merupakan suatu proses pembagian atau penyaluran kekayaan atau pendapatan negara yang mencakup keseluruhan aspek atau faktor-faktor yang ikut menentukan pendapatan, baik itu berupa sumber-sumber produksi maupun kekayaan produktif yang berasal daripada hasil kerja produksi atau output produksi dari barang-barang produktif yang dipungut negara melalui pajak, zakat, *khums*, *anfal*, dan *fay'* yang kemudian dimasukkan ke dalam *baitul mal* dan didistribusikan kembali kepada seluruh masyarakat dalam upaya merealisasikan jaminan sosial demi mewujudkan keseimbangan sosial ekonomi di dalam masyarakat.

Jika direlevansikan dengan distribusi pendapatan APBN di Indonesia maka Pemikiran Muhammad Baqr Ash-shadr mempunyai kesamaan terhadap proses penerimaan dan pendistribusiannya. Muhammad Baqr Ash-shadr, dalam hal penerimaan atau pendapatan negara yang terkumpul dalam Baitul Mal ada dua macam penerimaan atau pendapatan yaitu pertama, pendapatan yang diterima dari kepemilikan kekayaan sumber daya alam yang dikuasai negara itu sendiri dan Kedua, kekayaan produktif masyarakat (hasil kerja atau output produksi) yang dihasilkan oleh masyarakat melalui hasil kerja dari kekayaan sumber daya alam, yang dipungut oleh pemerintah berupa, pajak (zakat), *khums*, *anfal*, dan *fay'*. Adapun dalam hal pendistribusiannya, Negara membagikan kekayaan atau pendapatan negara ke dalam berbagai sektor antara lain sektor pendidikan, Sektor kesehatan, sektor keamanan, sektor pembangunan infrastuktur, dan sektor jaminan

sosial, dimana masyarakat yang tidak mampu memperoleh penghasilan atau pendapatan melalui kerja produktif mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah berupa uang tunai untuk memperbaiki standar hidupnya, dan juga memberikan kesempatan yang luas kepada seluruh individu untuk melakukan kerja produktif sehingga ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari usahanya sendiri.

Sedangkan konsep distribusi pendapatan APBN di Indonesia dalam hal penerimaan atau pendapatan negara juga berasal dari kepemilikan kekayaan sumber daya alam yang dikuasai negara itu sendiri dan kekayaan produktif masyarakat (hasil kerja atau output produksi) yang dihasilkan oleh masyarakat melalui hasil kerja dari kekayaan sumber daya alam, yang dipungut oleh pemerintah berupa, pajak penghasilan perseorangan, seperti hasil potongan penghasilan pekerjaan dan usaha pekerjaan, dan pajak badan seperti BUMN, badan usaha swasta, hasil pengutan kegiatan usaha, dan hasil potongan bunga, deviden, royalty, dan lainnya. Adapun dalam hal pendistribusiannya, pemerintah mendistribusikan pendapatan negara ke dalam anggaran belanja pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial dan anggaran untuk Subsidi energi.

B. *Saran*

Berdasarkan penelitian diatas maka direkomendasikan kepada pemerintah di dalam upaya untuk menciptakan kesejahteraan umum dan kemakmuran di masyarakat, berkenaan dalam hal pendistribusiannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan sosial di masyarakat dengan cara memberikan jaminan sosial kepada seluruh masyarakat agar dapat hidup dalam standar hidup yang umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman. *Muhammad sebagai seorang pedagang*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997.
- Al-ashafaniy, Raqib. *Mu'jam Mufradat al-fash Al-qur'an*. Beirut: Dar al Fikr, 2001.
- Al-Kharaf, Abdullah Zaky. *Ekonomi dalam perspektif Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Almizan. "Distribusi Pendapatan : Kesejahteraan Menurut Ekonomi Islam." *Jurnal Maqdis Vol. 2 No. 1*, 2016: 64.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Sistem Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Press, 2009.
- Anwar, Dessy. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Abditama, 2001.
- Aravik, Haris. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Depok: Kencana, 2017.
- Ash-Shadr, Muhammad Baqr. *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna di Terjemahkan oleh Yudi*. Jakarta: Zahra, 2008.
- . *Falsafatuna: Pandangan Muhammad Baqr ASH-Shadr terhadap Pelbagai Aliran Filsafat Dunia*. Bandung: Mizan, 1995.
- . *Ringkasan Iqtishaduna: Ekonomi Kita*. Yogyakarta: Rausyan Fikr, 2014.
- Aziz. "An Islamic Perspective of Political Economy: The Views of (late) Muhammad Baqir Al-Sadr Vol. 10 No. 1." *Journal Ahlul Bayt World Assembly*, 2018: 10.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Ekonomi Islam Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Az-Zuhaili, Prof. Dr. Wahbah. *Tafsir Al-munir Juz 14*. Jakarta: Gema Insani, 2014.
- "Badan Pusat Statistic." *Kemiskinan Penduduk Indonesia" Official Website Badan Pusat Statistik*. seninjuli2019. <https://www.bps.go.id/subject/4/kemiskinanpendudukindonesia.html#subjectviewtab3> (diakses juli senin, 2019).
- Basyir, Ahmad Azhar. *Refleksi atas Persoalan Keislaman (Seputar Filsafat, Hukum, politik, dan Ekonomi)*. Bandung : Mizan, 1993.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta ilmu-ilmu lainnya*. Jakarta: Kencana, 2008.

- Chamid, Nur. *jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Deliarnov. *Perkembangan Sejarah Pemikiran Ekonomi Edisi Ketiga*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Efendi, Rustam. *Produksi dalam Islam*. Yogyakarta: Megistra Insania, 2003.
- Fahlevi, Mochammad. "Islamic Economic and Politics in The View of Muhammad Baqr Ash-Shadr." *of Research in Busines, Economic and Management, Vol 13 Issue* , 2019: 2434.
- Faridi, F. R. "Theory of Fiscal on Policy in an Islamic State." *Journal J. Res. Islamic Econ Vol. 1 No. 1*, 1983: 17.
- Haneef, Mohammed Alam. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Analisis Komparatif Terpilih di Terjemahkan oleh : Suherman Rosyidi*. Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan ." *Iqra Vol. 8 No. 1*, 2014: 70.
- Hendrakusuma, F.X. Bhakti. "Kajian Teori Distribusi dalam Ekonomi Syariah ." *Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepalabuhanan Vol. 8 No. 2*, 2018: 169.
- Idri. *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Jaelani, Aan. *Islamic Public Finances: Reflections on the APBN an the Budget Politics in Indonesia*. MPRA: Paper, Cirebon: Nurjati Press, 2014 .
- Kambali, Muhammad. "Relevansi Pemikiran Muhammad Baqr Ash-Shadr." *JES Vol. 2 No. 2*, 2018: 186.
- Karaf, Abdullah Zaky al-. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- "KataData." *Orang Terkaya Indonesia*. 30 Oktober 2018. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/30/1/-orang-terkaya-indonesia-menguasai-46-kekayaan-penduduk> (diakses Juli 27, 2019).
- Kazwaini. "Epistimologi Perpajakan dalam Pemikiran Al- Mawardi." *An-Nida Vol. 41 No. 1*, 2017: 86.
- Machluf, Hasanain Muhammad. *Kalimat Al-qur'an Tafsir al bayan*. Cairo: Dar Al-Fikr, 1956.
- Mallat, Chibli. *Menyegarkan Islam dan kajian Kompherensif pertama hidup dan karya Muhammad Baqir Ash-Shadr, Penerjemah Santri Indra astuti*. Bandung: Mizan, 2001.

—. *The Renewal of Islamic Law: Penerjemah Santi Indra Astuti*. Bandung: Mizan, 2001.

Mannan, M. Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam Cet.3*. Yogyakarta: PT.Dana Bakti Prima Yasa, 1997.

Maulana, Rian. "Konsep Distribusi menurut Muhammad Baqr Ash-Shadr." *Al-Iqtishad Vol. 2 No. 2*, 2010: 83.

Murtiyani, Sitti. "Analisis dan Evaluasi Implementasi Pengelolaan Kepemilikan Umum Negara di Indonesia (Pendekatan Madzhab Hamfara)." *Jurnal SHARE Vol. 5 No. 2*, 2016: 84.

Nadhira, Nabila Zatadini dan A'yun. "An Exploratory Study on Islamic Economics As a Science." *International Conference on the Role Afro-Asian Universities in Building Civilization: Paper*. Malang: Universitas Darussalam Gontor Press, 2018. 567.

Noor, Ruslan Abdul Ghofur. "Kebijakan Distribusi dalam Ekonomi Islam dalam membangun keadilan Ekonomi Indonesia." *Jurnal ISLAMICA Vol. 6 No. 2*, 2012: 323.

Nordhaus, Paul A Samuelson and William. *Economics Cet.16*. New York: Mg-Raw Hill, 1998.

Nur, Agus Waluyo. "Membangun Sistem Ekonomi Berkeadilan: Telaah atas Pemikiran Muhammad Baqir Ash-Shadr." *Jurnal Muqtashid Vol. 2 No. 1*, 2011: 9.

Nurlaela, Nunung. "Analisis Distribusi keuangan Negara (Studi pemikiran Abdul Qadim Zallum)." *Jurnal Millah Vol. XV No. 1*, 2015: 2.

Nurul Huda, Dkk. *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Prasetyia, Ferry. "Rekonstruksi Sistem Fiskal dalam Bingkai Konstitusi." *of Indonesian Applied Economics Vol. 5 No. 2*, 2011: 151.

Prasetyia, Ferry. "Rekonstruksi Sistem Fiskal dalam Bingkai Konstitusi." *Jurnal of Indonesian Applied Economics Vol. 5 No. 2*, 2011: 151.

Qarim, Adiwarman. *Ekonomi mikro Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Qomar, Moh. Nurul. "Telaah Kritis Masalah Ekonomi Perspektif Ekonomi Muhammad Baqir Al-Sadr." *Jurnal Iqtishaduna Vol. 7 No. 1*, 2016: 1.

Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Rahmawati, Yuke. "Posisi Negara dalam menangani kepemilikan Publik distribusi tanah milik negara dalam membangun ekonomi masyarakat miskin." *Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 5 No. 2*, 2015: 4-5.

Reksopriyatno. *Sistem Ekonomi Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: Bina Grafika, 2004.

RI, Departemen Agama. *Al-qur'an dan Terjemah Al-furqan*. Jakarta: PT. Citra Mulia Agung, 2015.

—. *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Furqan*. Jakarta: PT. Citra Mulia Agung, 2015.

RI, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Riaynol, Syafrinaldi dan. "Analisa Pemikiran Muhammad BaqirAsh-Shadr tentang distribusi dan keterkaitannya dengan produksi." *Jurnal Hukum Islam Vol. 1. No. 1*, 2017: 3-4.

Rozalinda. *Ekonomi Islam dan Aplikasinya dalam Aktivitasnya Ekonomi*. Jakarta : Rajawali Pers, 2015.

Shihab, M. Quraissy. *Tafsir Al-Misbah Volume 14*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

—. *Tafsir Al-Misbah Volume 3 Pesan, Kesan & Keserasian Al-Qur'an*. Ciputat: Lentera Hati, 2002.

Sirajuddin. *Pengantar Ekonomi Makro*. Makassar : Alauddin University Press, 2012.

Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia, 2002.

Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Sukirno, Sadono. *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah, dan dasar Kebijakan*. Jakarta : Kencana, 2006.

Sukmawati, Ratna. *Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta: Galaxy Puspa Mega, 2008.

Sulaiman, Thahir Abdul Muslim. *Menanggulangi Krisis Ekonomi secara Islam*. Bandung: PT. Al Maarif, 1985.

Sulistani, Siska Lis. "Distribusi dalam pembangunan Ekonomi Islam untuk Pembangunan Negara Menurut Muhammad Baqir Ash-shadr dan M Abdul Mannan." *Jurnal Amwaluna Vol. 1. No. 1*, 2017: 144.

Suparmoko, M. *Keuangan Negara: Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: BPFE, 2003.

Swasono, Sri Edi. *Membangun Sistem Ekonomi Nasional: Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: UI press, 1987.

Thabathaba'i, Muhammad Husain. *Tafsir Al-Mizan Juz 17*. Cairo: Dar al-kutub al-Islamiyyah, 1342.

Ubay. "Pemikiran Muhammad Baqir Sadr." *Jurnal Hunafa Vol. 2 No. 3*, 2005: 5.

Wulandari, Permata. "Unique Aspects of Islamic microfinance financing process: Experience of baitul maal wattamwil in Indonesia." *Jounal Humanomics, Vol. 32*, 2016: 1.

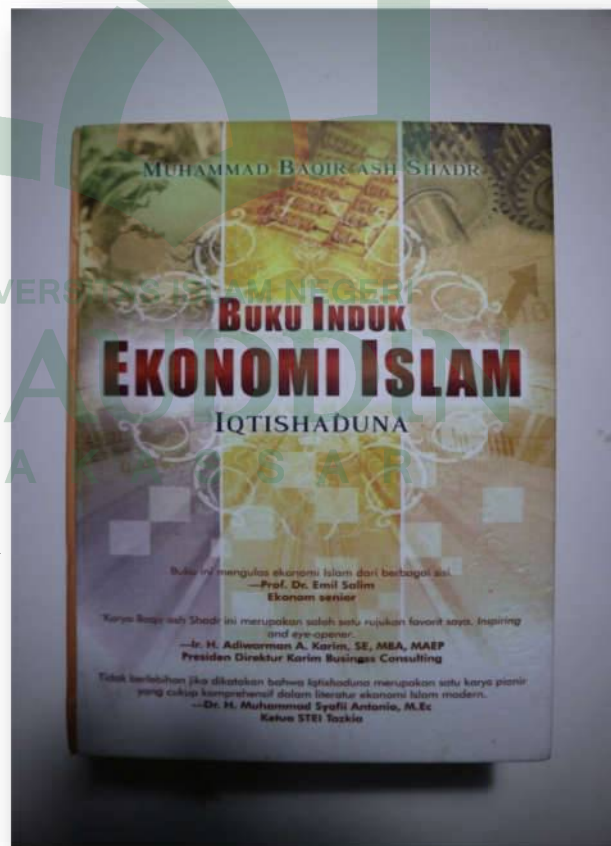
Yohandarwati. *Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Kependudukan, Kesejahteraan Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: BAPPENAS, 2002.



LAMPIRAN



Ayatullah Muhammad Baqir Ash-Shadr,
Menulis Karya *Iqtishaduna* “Ekonomi Kita”



RIWAYAT HIDUP



Munzir (90100115147), lahir di Bulukumba pada tanggal 28 Mei 1997, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Tasman dan Ibu Aisyah. Jenjang pendidikan formal yang ditempuh penulis adalah SDN 174 Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba,

Lulus tahun 2009, kemudian setelah lulus Sekolah Dasar, penulis melanjutkan di Pondok Pesantren SMPS Al-furqan Ereng- ereng Kabupaten Bantaeng lulus tahun 2012. Kemudian melanjutkan SMAN 12 Bulukumba dan lulus pada tahun 2015. Setelah menyelesaikan SMA, penulis diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam. Selama masa perkuliahan penulis pernah aktif di KSEI Forkeis UIN Alauddin Makassar, HMJ EI, dan Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Ekonomi dan Bisnis Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R